



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan otonomi daerah dan desentralisasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan Otonomi Daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang harus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Selanjutnya juga dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu digantikan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pasal 184 ayat 1 dan 2 dijelaskan, bahwasannya Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Selanjutnya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas akun-akun laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Neraca dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan dan nonkeuangan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Maksud. Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan. Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban keuangan daerah.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023; dan
25. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Sistematika Penulisan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Penyusunan Laporan Keuangan

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN**

TARGET KINERJA APBD



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

Ekonomi Makro

Kebijakan Keuangan

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan SKPD

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis LO

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

**BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN**

Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan-SAL

Penjelasan Akun-akun Neraca

Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi Lainnya Berkenaan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB VII PENUTUP**



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

## BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

### 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Barito Utara yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,61%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,14%
- c. Gini Ratio sebesar 0,32%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,79%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7114,5%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 5,13%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp74.979.108.

Sebagaimana diketahui bahwa APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang mana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, dan akuntabel sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan APBD Tahun 2022 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

#### 2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Hal ini mengandung makna bahwa APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tersebut meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis atau objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

#### 3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi;
  - b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggaran dalam APBD;
  - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
4. Keadilan Anggaran
- Pajak, retribusi, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan hal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tariff secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai dalam rangka Pelaksanaan Program atau Kegiatan APBD. Untuk maksud tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara berikut disampaikan keadaan ekonomi makro Kabupaten Barito Utara.

### 2.2. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Barito Utara periode tertentu.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Utara**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Barito Utara (%)	5,80	5,35	(2,09)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	3,61	3,44	(0,30)
3	Provinsi (%)	5,28	5,11	(0,12)
4	Nasional (%)	10,14	9,36	(0,78)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

5	Peringkat Provinsi Barito Utara Thd Kalteng	Tertinggi ke 5 di kalteng	Belum tersedia	Belum tersedia
6	Peringkat Nasional Kalteng Thd Indonesia	Terendah ke-5 di Indonesia	Belum tersedia	Belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

Persentase penduduk miskin Barito Utara pada Tahun 2022 sebesar 5,80 % mengalami Kenaikan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin naik menjadi 5,35 % Persentase penduduk miskin 2021 Barito Utara di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Barito Utara**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Barito Utara	1,05	0,57	(0,6)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kalimantan Tengah	0,91	0,66	(0,20)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,60	(0,11)
4	Peringkat Provinsi	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia
5	Peringkat Nasional	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

**Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Barito Utara**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Barito Utara	0,25	0,13	(0,13)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kalimantan Tengah	0,27	0,14	(0,13)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,40	(0,02)
4.	Peringkat Provinsi Barito Utara Thd Kalteng	Tertinggi ke 6 di kalteng	Belum tersedia	Belum tersedia
5	Peringkat Nasional Kalteng Thd Indonesia	Terendah ke-4 di Indonesia	Belum tersedia	Belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

### 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Barito Utara Tahun 2023 adalah sebesar 4,85%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Utara**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Barito Utara (%)	4,82	4,85	(0,32)
2	Tingkat Pengangguran Kalimantan Tengah (%)	4,26	4,10	(0,27)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,32	(1,17)
4	Peringkat Provinsi (Barut terhadap Kalteng)	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia
5	Peringkat Nasional (Kalteng Thd Indonesia)	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Barito Utara Tahun 2023 menurut data BPS





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

menunjukkan angka sebesar 4,85%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,82% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Namun, dengan demikian TPT Barito Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi 4,10%, dan sebesar 4,26% pada Tahun 2022.

### 2.4. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Barito Utara Realisasi pencapaian Gini Ratio Barito Utara Tahun 2022 belum tersedia berdasar data Sumber BPS Barito Utara dalam Angka Tahun 2022.

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Barito Utara yang diukur oleh Gini Ratio belum tersedia dari BPS, jika dibandingkan dengan Gini Ratio.

### 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah ( $<60$ )
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $>80$ )

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Barito Utara Realisasi pencapaian IPM Barito Utara Tahun 2023 adalah sebesar 71,84 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Barito Utara	71,21	71,84	(0,42)
2	Provinsi Kalimantan Tengah	71,63	72,20	(0,38)





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
3	Indonesia/Nasional	72,29	71,30	(0,99)
4	Peringkat Provinsi	Tertinggi ke -6 Kalteng	Belum tersedia	Belum tersedia
5	Peringkat Nasional	Tertinggi ke 20 di Indonesia	Belum tersedia	Belum tersedia

Sumber Dokumen BPS Barito Utara

Realisasi pencapaian IPM Barito Utara adalah sebesar 71,84 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 70,21 poin mengalami kenaikan sebesar 0,42%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB perkapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,58 tahun pada Tahun 2023, lebih cepat 73,58 tahun 2022 dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 12,54 tahun 2023 dengan harapan lama sekolah 12,53 tahun 2022. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp9.220,7 atau meningkat Rp9.800,7 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Barito Utara pada saat ini berada pada urutan 4 dari 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan berada pada urutan 21 untuk peringkat nasional(indonesia) dari 34 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

**2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara**

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Miliar Rupiah)	7.7131.777,7	7.597.871,7	8.015.275,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,24	5,80	5,35
3	Peringkat Provinsi	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2023 perekonomian Barito Utara mengalami peningkatan rata-rata 51.866.779. Pada periode Tahun 2021– Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Barito Utara sebesar -2,24 % dan pada kurun waktu Tahun 2019 s.d. Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Barito Utara sebesar 2,34%.

**2.7. Inflasi**

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Barito Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*HyperInflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Barito Utara Tingkat Inflasi belum ada data dan dilakukan perhitungan, data inflasi yang tersedia hanya pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan KotaMadya Palangkaraya.

**2.8. Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Utara**

Struktur perekonomian Barito Utara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1 225,2	1 259 207,5	1 342 466,7
2	Pertambangan dan Penggalian	3 715,7	6 977 701,7	6 223 549,4
3	Industri Pengolahan	1 027,3	1 079 245,6	1 129 607,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,3	7 008,3	8 137,0
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,3	19 409,1	20 792,9
6	Konstruksi	658,4	735 168,2	824 354,7
7	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	739,8	797 189,4	858 152,2
8	Transportasi dan Pergudangan	783,9	902 290,7	1 059 020,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,4	193 925,1	210 735,6
10	Informasi dan Komunikasi	128,9	142 221,4	148 998,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	199,9	217 734,4	230 537,6
12	Real Estate	187,7	193 236,9	204 886,0
13	Jasa Perusahaan	1,1	1 255,0	1 404,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	645,5	658 174,8	704 804,2
15	Jasa Pendidikan	580,8	601 583,8	658 736,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	335,6	350 030,2	379 149,1
17	Jasa Lainnya	150,7	162 260,4	172 945,4
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10578,7	162 260,4	14 178 277,1
19	PDRB Provinsi	6,76	6,76	
20	PDRB Nasional	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia
21	Peringkat Provinsi	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia
22	Peringkat Nasional	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

**Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara, 2010-2023**

TAHUN	UMUR HARAPAN HIDUP	HARAPAN LAMA SEKOLAH	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	PENGELUARAN PERKAPITA YANG DISESUAIKAN	IPM
1	2	3	4	5	6
2013	70,81	11,01	7,97	7614	65,12
2014	70,91	11,15	8,00	8326	66,30
2015	71,01	11,50	8,33	8534	67,38
2016	71,26	11,96	8,34	8774	68,29
2018	71,28	12,40	8,59	9357	69,72
2019	71,29	12,48	8,60	10010	70,52
2020	71,30	12,49	8,71	9936	70,59
2021	71,30	12,50	8,85	9936	70,59



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

2022	71,50	12,53	8,90	10 182	71,21
2023	73,58	12,54	8,91	10 720	71,84

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2021

### 2.9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ekonomi Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 tumbuh sebesar -2,24 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -7,66 %. Terjadinya Penurunan yang tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara dibandingkan tahun 2022 PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 9.391,7 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2022 sebesar 9,801,1 miliar rupiah. Tahun 2022 sektor pengadaan Pertambangan dan Penggalian memberi sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 14,86% kemudian disusul sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,71 % baru sektor-sektor lainnya.

Produk Domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari sembilan lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut **SISTEM NERACA REGIONAL TECHNICAL NOTES** total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LNPRM, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor.

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 9.800,7 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022 yang besarnya mencapai 9.220,7 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023 sebesar 7,114,5 miliar rupiah.



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

Tahun 2023, sektor yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 14,86%, kemudian disusul sektor pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,7%, baru sektor-sektor lainnya.

### 2.10. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### A. Pendapatan

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan PAD terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat. Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - a. Hasil Pajak Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer.
  - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
  - b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya: Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian; dan



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

- c. Transfer Pemerintah Provinsi: Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya;
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah: Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah dari komponen-komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi baik pajak dan retribusi daerah, dengan tetap berpegang pada prinsip yang berkeadilan dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan konvensional akan dikembangkan kemungkinannya pada sumber pendapatan alternatif, berupa peningkatan penanaman modal daerah (investasi daerah), pendirian/penyehatan perusahaan daerah (BUMD), kemitraan dengan swasta atau pinjaman daerah;
  - a. Peningkatan efisiensi, penentuan skala prioritas dan kebijakan umum alokasi belanja yang tepat. Kebijakan belanja yang cermat, ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat (*the right place on the righttime*);
  - b. Memberikan perangsang dan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak dan retribusi;
  - c. Mengembangkan perubahan paradigma dari upaya memperbesar (membengkakan) anggaran belanja menjadi bagaimana memperoleh pendapatan oleh SKPD yang mempunyai potensi pendapatan dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan;
  - d. Meningkatkan koordinasi antar SKPD/instansi yang menangani penerimaan pendapatan daerah, serta koordinasi dengan para pengusaha, pemerintah provinsi dan pusat;
  - e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah pada umumnya, khususnya aparatur pemerintah daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan atau pendapatan daerah; dan
  - f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah;

### **B. Belanja**

Dalam mekanisme penyusunan anggaran alokasi belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja pada Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:

1. Belanja Operasi. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal. Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya;

3. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
4. Transfer/Bagi Hasil ke Desa.

Arah kebijakan anggaran belanja Kabupaten Barito Utara tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja dengan penyusunan rencana anggaran belanja berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran;
2. Meningkatkan alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas, menunjang usaha-usaha produktif dan mempunyai multiplier effect luas serta berjangka panjang dan dihindari untuk belanja yang bersifat konsumtif;
3. Pembangunan baru gedung/kantor/rumah jabatan dan pengadaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat hanya dapat dipertimbangkan untuk yang sangat prioritas, selektif dan berkeadilan;
4. Belanja langsung yang hasil, manfaat, dan dampaknya untuk publik disesuaikan prioritas pembangunan tahun 2023 dengan tidak mengabaikan pembangunan lainnya yang tidak termasuk prioritas;
5. Belanja bantuan, khususnya bantuan sosial dialokasikan sesuai kemampuan dengan prinsip terbatas, tidak mengikat, tidak terus menerus dan berkeadilan. Terbatas dimaksudkan bahwa bantuan tersebut berfungsi sebagai stimulan/perangsang, karenanya tidak mungkin memenuhi totalitas kebutuhan lembaga/organisasi yang membutuhkan;
6. Tidak mengikat dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah tidak terikat harus membantu atau Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan untuk dapat membantu atau bantuan sesuai keuangan daerah. Sedangkan bantuan tidak bisa diberikan secara terus menerus yang dapat menciptakan ketergantungan dan melembaga. Sifat bantuan harus dapat memberikan keadilan atau tidak hanya untuk kelompok/golongan tertentu;
7. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten lainnya dapat dilakukan sesuai keperluan dalam rangka pembiayaan strategis dalam bentuk pembiayaan bersama (sharing);
8. Tidak diperkenalkannya pengalokasian belanja yang diperuntukkan membantu instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah; dan
9. Meningkatkan pengawasan atas belanja, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pembukuan/inventarisasi barang/aset daerah.

### C. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik



## **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA** **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 adalah:

1. Prinsip anggaran defisit dilaksanakan dalam rangka penganggaran belanja publik yang sangat prioritas, dan akan dihindari penganggaran defisit yang didorong karena meningkatnya belanja aparatur;
2. Sisa lebih tahun anggaran yang lalu akan digunakan untuk menutup defisit anggaran, dan sebagian dialokasikan pada sisa lebih tahun anggaran berkenaan, pembayaran pokok hutang, penyertaan modal dan cadangan; dan
3. Menghindari pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah maupun penjualan aset daerah.





# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

## BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut fungsi. Klasifikasi ini bertujuan untuk menjamin adanya keselarasan dan keterpaduan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fungsi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan terdapat dalam fungsi pelayanan umum. Arah kebijakan dalam fungsi pelayanan umum yang terkait dengan kinerja keuangan adalah:

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua kegiatan pada semua urusan dan lini pemerintahan; dan
2. Peningkatan pendapatan daerah, kebijakan alokasi anggaran yang tepat, efisien, dan berkeadilan dengan semakin meningkatkan alokasi untuk belanja publik.

Capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 secara umum tercermin atas capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Program Kegiatan Untuk Mendukung Capaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Ta 2023**

NO	URAIAN	JML PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	285	686.741.030.291,00	562.734.934.002,46	81,94	124.006.096.288,54
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6	55.888.649.205,00	41.314.881.255,43	73,92	14.573.767.949,57
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4	100.354.084.750,00	92.529.784.335,00	92,20	7.824.300.415,00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	299.580.750,00	48.481.250,00	16,18	251.099.500,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1	131.559.000,00	126.744.400,00	96,34	4.814.600,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.402.587.500,00	1.114.073.506,00	79,43	288.513.994,00
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	6	965.948.250,00	823.546.744,00	85,26	142.401.506,00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	3	1.229.578.500,00	700.926.800,00	57,01	528.651.700,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	JML PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	KESEHATAN					
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	378.157.668.875,00	281.426.999.351,29	74,42	96.730.669.523,71
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2	774.000.000,00	648.987.570,00	83,85	125.012.430,00
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3	3.788.715.001,00	3.270.117.929,00	86,31	518.597.072,00
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2	34.220.627.325,00	32.959.589.568,00	96,31	1.261.037.757,00
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	7.796.037.000,00	7.413.446.689,00	95,09	382.590.311,00
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	9.188.207.000,00	8.826.709.855,00	96,07	361.497.145,00
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	115.898.694.911,00	106.552.573.568,00	91,94	9.346.121.343,00
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	888.000.000,00	619.059.000,00	69,71	268.941.000,00
17	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN	1	35.274.881.335,00	34.053.514.866,00	96,54	1.221.366.469,00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	232.649.063,00	220.295.283,00	94,69	12.353.780,00
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2	1.250.051.625,00	1.222.163.369,00	97,77	27.888.256,00
20	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1	2.370.775.000,00	2.303.016.700,00	97,14	67.758.300,00
21	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	542.229.950,00	496.945.450,00	91,65	45.284.500,00
22	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1	61.312.750,00	21.360.100,00	34,84	39.952.650,00
23	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1	28.919.304.379,00	1.653.238.740,00	5,72	27.266.065.639,00
24	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	1	23.968.125,00	8.271.200,00	34,51	15.696.925,00
25	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3	4.621.249.504,00	1.213.020.071,00	26,25	3.408.229.433,00
26	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5	7.988.538.399,00	6.643.232.803,00	83,16	1.345.305.596,00
27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4	14.194.811.250,00	13.390.689.211,00	94,34	804.122.039,00
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	4.464.478.000,00	4.425.467.532,00	99,13	39.010.468,00
29	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2	2.389.300.000,00	1.830.107.251,00	76,60	559.192.749,00
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	2	540.709.000,00	369.822.179,00	68,40	170.886.821,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	JML PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	JAMINAN SOSIAL					
31	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2	3.037.591.000,00	1.488.208.468,00	48,99	1.549.382.532,00
32	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	90.000.000,00	74.965.000,00	83,29	15.035.000,00
33	PROGRAM PENATAAN DESA	1	133.222.000,00	104.119.501,00	78,15	29.102.499,00
34	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	1.915.771.941,00	1.704.663.660,00	88,98	211.108.281,00
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	1.264.731.139,00	1.255.577.418,00	99,28	9.153.721,00
36	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2	167.861.244,00	140.705.796,00	83,82	27.155.448,00
37	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2	1.150.540.000,00	1.133.283.378,00	98,50	17.256.622,00
38	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2	41.000.000,00	40.883.100,00	99,71	116.900,00
39	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2	110.000.000,00	106.274.400,00	96,61	3.725.600,00
40	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2	134.961.000,00	94.611.500,00	70,10	40.349.500,00
41	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	183.682.000,00	155.842.250,00	84,84	27.839.750,00
42	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2	468.691.750,00	379.343.750,00	80,94	89.348.000,00
43	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	85.826.750,00	53.903.900,00	62,81	31.922.850,00
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	1.124.143.000,00	860.892.429,00	76,58	263.250.571,00
45	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	886.525.500,00	568.905.000,00	64,17	317.620.500,00
46	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	133.540.000,00	124.679.500,00	93,36	8.860.500,00
47	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2	36.460.000,00	24.307.500,00	66,67	12.152.500,00
48	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3	169.610.655,00	138.522.175,00	81,67	31.088.480,00
49	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3	324.826.000,00	150.277.051,00	46,26	174.548.949,00
50	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	74.920.960,00	62.415.098,00	83,31	12.505.862,00
51	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	50.000.000,00	39.194.210,00	78,39	10.805.790,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	JML PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
52	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2	222.115.500,00	148.834.349,00	67,01	73.281.151,00
53	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2	523.973.875,00	213.638.952,00	40,77	310.334.923,00
54	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	294.276.500,00	269.917.750,00	91,72	24.358.750,00
55	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4	1.953.523.805,00	1.634.283.624,00	83,66	319.240.181,00
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1	1.784.626.287,00	1.671.920.848,00	93,68	112.705.439,00
57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3	522.011.000,00	467.506.260,00	89,56	54.504.740,00
58	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2	115.393.850,00	85.537.250,00	74,13	29.856.600,00
59	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	44.494.000,00	40.678.200,00	91,42	3.815.800,00
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2	220.530.000,00	217.308.500,00	98,54	3.221.500,00
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2	4.839.215.790,00	4.733.507.775,00	97,82	105.708.015,00
62	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	345.443.118,00	337.019.175,00	97,56	8.423.943,00
63	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3	101.560.200,00	98.288.155,00	96,78	3.272.045,00
64	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1	55.500.000,00	45.041.553,00	81,16	10.458.447,00
65	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	16.877.759.795,00	15.527.912.348,00	92,00	1.349.847.447,00
66	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2	1.803.646.250,00	1.286.544.394,00	71,33	517.101.856,00
67	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3	2.493.824.800,00	1.850.715.865,00	74,21	643.108.935,00
68	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	4.169.020.430,00	3.207.408.608,00	76,93	961.611.822,00
69	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2	41.234.000,00	32.406.100,00	78,59	8.827.900,00
70	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	842.123.400,00	494.551.751,00	58,73	347.571.649,00
71	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM	1	87.610.000,00	86.337.918,00	98,55	1.272.082,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	JML PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
72	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	878.323.750,00	723.164.641,00	82,33	155.159.109,00
73	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	40.123.000,00	34.254.643,00	85,37	5.868.357,00
74	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1	347.498.250,00	347.185.750,00	99,91	312.500,00
75	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1	243.365.000,00	211.665.760,00	86,97	31.699.240,00
76	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2	237.065.750,00	235.492.959,00	99,34	1.572.791,00
77	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	0,00
78	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2	4.630.980.000,00	4.079.999.807,00	88,10	550.980.193,00
79	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2	4.356.140.500,00	3.723.855.130,00	85,49	632.285.370,00
80	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	5.898.288.500,00	5.751.482.718,00	97,51	146.805.782,00
81	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2	12.012.453.000,00	10.844.199.834,00	90,27	1.168.253.166,00
82	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	104.681.000,00	80.108.636,00	76,53	24.572.364,00
83	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	265.073.600,00	169.014.052,00	63,76	96.059.548,00
84	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	310.000.000,00	309.245.259,00	99,76	754.741,00
85	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	291.055.000,00	285.656.491,00	98,15	5.398.509,00
86	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	553.000.000,00	322.373.000,00	58,30	230.627.000,00
87	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	50.200.000,00	50.136.200,00	99,87	63.800,00
88	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2	2.886.660.825,00	2.629.171.152,00	91,08	257.489.673,00
89	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2	16.514.421.750,00	16.335.135.035,00	98,91	179.286.715,00
90	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2	5.219.914.650,00	4.655.573.996,00	89,19	564.340.654,00
91	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	159.730.000,00	160.135.000,00	100,25	-405.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	JML PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
92	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	1	3.587.937.750,00	3.312.810.205,00	92,33	275.127.545,00
93	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	357.918.000,00	310.460.398,00	86,74	47.457.602,00
94	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2	559.785.983,00	557.812.669,00	99,65	1.973.314,00
95	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	3	194.193.719,00	191.106.450,00	98,41	3.087.269,00
96	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN	2	52.625.829,00	52.497.403,00	99,76	128.426,00
97	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4	9.406.320.330,00	9.406.320.330,00	100,00	0,00
98	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3	22.047.048.450,00	21.710.786.860,00	98,47	336.261.590,00
99	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3	585.074.250,00	576.927.650,00	98,61	8.146.600,00
100	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	685.719.250,00	681.856.024,00	99,44	3.863.226,00
101	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2	352.426.000,00	351.594.962,00	99,76	831.038,00
102	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	2.859.614.475,00	2.849.493.771,00	99,65	10.120.704,00
103	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	1.315.228.250,00	1.281.179.108,00	97,41	34.049.142,00
104	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	953.988.751,00	927.923.755,00	97,27	26.064.996,00
105	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	1	167.849.625,00	167.849.625,00	100,00	0,00
106	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	1	209.781.750,00	169.102.585,00	80,61	40.679.165,00
107	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	55.169.106.296,00	52.250.881.484,00	94,71	2.918.224.812,00
108	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4	3.088.472.625,00	2.363.474.263,00	76,53	724.998.362,00
109	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6	24.104.762.625,00	19.506.728.307,00	80,92	4.598.034.318,00
110	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	1.761.400.000,00	1.664.658.365,00	94,51	96.741.635,00
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	263.495.475.981,00	176.392.978.315,24	66,94	87.102.497.665,76
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	1.076.998.000,00	823.308.808,00	76,44	253.689.192,00
113	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4	6.613.158.125,00	5.693.693.781,00	86,10	919.464.344,00
114	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3	1.554.210.250,00	1.207.852.516,00	77,71	346.357.734,00
115	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	3	379.499.250,00	289.383.202,00	76,25	90.116.048,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	JML PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
116	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	254.085.125,00	252.987.309,00	99,57	1.097.816,00
117	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2	2.849.756.114,00	2.457.519.723,00	86,24	392.236.391,00
118	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2	712.969.000,00	618.216.963,00	86,71	94.752.037,00
119	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	1.729.237.375,00	1.691.788.604,00	97,83	37.448.771,00
120	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1	15.878.834.318,00	15.622.201.863,00	98,38	256.632.455,00
121	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	95.095.250,00	82.037.053,00	86,27	13.058.197,00
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	1	517.164.250,00	480.840.684,00	92,98	36.323.566,00
123	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1	816.370.000,00	713.780.139,00	87,43	102.589.861,00
124	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	9	322.742.500,00	322.742.500,00	100,00	0,00
125	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	273.000.000,00	243.000.000,00	89,01	30.000.000,00
126	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	4	135.485.750,00	59.627.500,00	44,01	75.858.250,00
127	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3	32.000.000,00	17.500.000,00	54,69	14.500.000,00
128	PROGRAM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.028.742.824.098,00</b>	<b>1.626.391.208.274,42</b>	<b>80,17</b>	<b>402.351.615.823,58</b>

**3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara**

Selama Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1.917.108.048.047,00 dengan realisasi sebesar Rp2.260.438.721.167,04 atau 117,91% sedangkan tahun 2022 sebesar Rp1.352.277.797.898,69. Ada kenaikan penerimaan pendapatan selama TA 2023 sebesar





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

Rp908.160.923.268,35 atau 67,16% Penerimaan Pendapatan TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah sebesar Rp94.692.794.725,87 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp21.706.872.729,00 dengan realisasi sebesar Rp24.903.662.174,70 atau 114,73% sedangkan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp21.706.872.729,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.200.409.777,20 atau 93,06% ada kenaikan pendapatan sebesar Rp4.703.252.397,50 atau 23,28%;
  - b. Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp14.724.760.817,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.026.715.028,00 atau 61,30% sedangkan Tahun 2022 realisasi sebesar Rp10.131.945.418,00 atau 68,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.724.760.817,00 maka terdapat penurunan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp1.105.230.390,00 atau 10,91%;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp11.614.597.000,00 dengan realisasi sebesar Rp477.599.093,96 atau 4,11% sedangkan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.058.366.983,00 atau 100,58% maka terdapat Penurunan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp9.580.767.889,04 atau 95,25%;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp54.466.449.270,00 dan direalisasikan sebesar Rp60.284.818.429,21 atau 110,68% Sedangkan Tahun 2022 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp99.124.185.912 dan direalisasikan sebesar Rp68.005.366.983,00 atau 68,61%. Ada penurunan pendapatan sebesar Rp7.720.733.167,68 atau 11,35%;
  - e. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.814.595.368.231,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.144.905.969.818,00 atau 118,20%. Sedangkan Tahun 2022 Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.121.465.387.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.223.758.813.286,60 atau 109,12%. Ada kenaikan Pendapatan Transfer sebesar Rp921.147.156.531,40 atau 75,27%;
  - f. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp998.259.339.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.242.016.532.930,00 atau 124,42% sedangkan Tahun 2022 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp287.678.212.000,00 direalisasikan sebesar Rp364.277.608.119.846,00. Ada kenaikan Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp877.738.924.419,00 atau 240,95 %;
  - g. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp519.181.671.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp519.179.304.326,00 atau 100,00%; sedangkan Tahun 2022 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp501.624.803.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp500.634.214.445,00 atau 99,80%; ada kenaikan sebesar Rp18.545.089.881,00 atau 3,70%;
  - h. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Rp86.481.099.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp84.255.485.379,00 atau 97,43% Sedangkan Tahun 2022 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp116.207.382,00 dan direalisasikan sebesar Rp113.091.807.470,00 atau 97,32% ada penurunan sebesar Rp28.836.322.091,00 atau 25,50%;

- i. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp116.262.427.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp79.819.465.183,00 atau 68,65% sedangkan Tahun 2022 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp116.018.492.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp77.064.489.420,00 atau 66,42% ada kenaikan sebesar Rp2.754.975.763,00 atau 3,57%;
  - j. Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sebesar Rp5.794.231,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.794.231.000,00 atau 100.000%; sedangkan Tahun 2022 Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp2.461.865.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.461.865.000,00 atau 100% ada kenaikan sebesar Rp3.332.366.000,00 atau 135,36%;
  - k. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp74.405.038.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp76.583.107.000,00 atau 102,93%; sedangkan tahun 2022 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp77.474.633.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp77.474.633.000,00 atau 100% ada penurunan sebesar 891.526.000,00 atau 1,15%;
  - l. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp137.107.844.000,00 atau 685,54%. Sedangkan Tahun 2022 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp88.604.195.440,60 atau 307,65%. ada kenaikan sebesar Rp48.503.648.559,40 atau 54,74%; dan
  - m. Pendapatan Bagi Hasil lainnya dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,00%. Sedangkan Tahun 2022 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp150.000.000 atau 0,00%.
2. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp20.839.956.623,17 terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.839.956.623,17; dan
  - b. Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00.

### 3.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara

Realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2023 terdiri dari belanja dan transfer. Anggaran Belanja dianggarkan Rp2.029.907.824.098,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.666.102.458.458,42 atau 82,08%. Anggaran Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp230.282.302.355,00 dan direalisasikan sebesar Rp230.307.693.912,24 atau 100,01%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 Anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp1.453.394.697.170,00 dan direalisasikan sebesar Rp158.745.329.561,23 atau 87,30% dengan rincian:



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.276.223.590.386,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.053.820.269.567,00 atau 82,57%. Sedangkan untuk Tahun anggaran 2022 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp967.497.039.803,00 dan direalisasikan sebesar Rp816.703.080.907,00 atau 84,41%;
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp753.125.573.302,00 dan direalisasikan sebesar Rp612.282.188.891,42 atau 81,30%; Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp322.434.773.542,00 dan direalisasikan sebesar Rp293.383.355.839,00 atau 90,99 %;
3. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp558.660.410,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%; Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.929.785.964,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%; dan
4. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp230.282.302.355,00 dan direalisasikan sebesar Rp230.307.693.912,24 atau 100,01%. Belanja Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp3.643.163.355,00 dengan realisasi sebesar Rp2.788.734.312,24 dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp226.639.139.000,00 dengan realisasi sebesar Rp227.518.959.600,00 atau 100,39%. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp160.533.097.861,00 dan direalisasikan sebesar Rp158.745.329.561,23 atau 98,89%.

### 3.4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp465.273.128.137,00 dan direalisasikan sebesar Rp465.273.128.136,85 atau 100,00%. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp384.876.677.305,00 dan direalisasikan sebesar Rp384.827.096.545,39 atau 99,99%.

### 3.5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp27.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.000.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian: Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp27.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.000.000.000,00 atau 100,00%.

### 3.6. Kendala dan Hambatan Pencapaian Target

Pada tahun 2023 realisasi Pendapatan pada umumnya mencapai target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar 117,91%. Realisasi belanja daerah secara umum di bawah target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 82,08 %, hal tersebut antara lain disebabkan adanya efisiensi atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta adanya rasionalisasi

### 3.7. Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis LO

1. Pendapatan LO Tahun 2023

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Pendapatan Operasional sebesar Rp1.521.359.068.214,41 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Pendapatan Operasional sebesar Rp2.347.402.453.761,96 terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

a. Pendapatan Asli Daerah LO	Rp	98.696.314.491,90
b. Pendapatan Transfer-LO	Rp	2.063.132.106.932,89
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	Rp	185.574.032.337,17

2. Beban Tahun 2023

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Beban Operasional sebesar Rp1.043.676.837.939,76 Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Beban Operasional sebesar Rp1.395.401.402.048,25 yang terdiri dari:

a. Beban Pegawai	Rp480.094.108.930,00
b. Beban Persediaan	Rp171.976.912.004,97
c. Beban Jasa	Rp166.168.171.906,00
d. Beban Pemeliharaan	Rp19.037.860.071,00
e. Beban Perjalanan Dinas	Rp102.492.122.558,00
f. Beban Bunga	Rp0,00
g. Beban Subsidi	Rp23.500.000,00
h. Beban Hibah	Rp102.335.824.376,00
i. Beban Bantuan Sosial	Rp2.554.815.594,00
j. Beban Penyisihan Piutang	Rp1.659.196.065,78
k. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp193.885.751.452,00
l. Beban Transfer	Rp 153.973.079.257,50
m. Beban Lain-lain	Rp1.200.059.833,00

3. Kegiatan Non Operasional

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.018.186.643,00. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.438.215.451,00.

4. Pos Luar Biasa

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Kegiatan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Kegiatan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00.

5. Surplus / Defisit LO

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Surplus/Defisit LO sebesar Rp947.562.836.262,71 Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Surplus/Defisit LO sebesar Rp472.654.043.631,65.



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut.

### 4.1. Entitas Akuntansi

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Tujuan Kebijakan Pelaporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, tidak termasuk perusahaan daerah. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan: LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK SKPKD. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan – LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak Berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

### Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet* atau *statement of financial position*) merupakan bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

### Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Barito Utara, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.

1. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
2. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

3. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi nonpermanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Investasi permanen lainnya.
4. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
5. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama(kemitraan).

### **Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### **Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

### **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

### **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diperlukan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan Penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diperlukan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk Penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diperlukan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar Penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diberikan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk Penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan Pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, Dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

### **Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

pokoknya; dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

### **Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro**

Catatan atas Laporan Keuangan dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, entitas pelaporan menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan - kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan indikator terkait lainnya yang perlu diinformasikan.

### **Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target**

Catatan atas Laporan Keuangan dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja,



## **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: nilai target total, nilai realisasi total, persentase perbandingan antara target dan realisasi, dan alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

### **Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan**

Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Asumsi Dasar Akuntansi**

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: Asumsi kemandirian entitas, Asumsi kesinambungan entitas, dan Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terwujudnya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan asset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### **Pengguna Laporan Keuangan**

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Utara meliputi: Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan Pemerintah. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, atau Laporan Perubahan Ekuitas terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

### **Kebijakan Akuntansi**

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

1. Pertimbangan Sehat;
2. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan;
3. Substansi Mengungguli Bentuk;
4. Transaksi dan kejadian lain dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian; dan
5. Materialitas.

Laporan keuangan mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

1. Entitas pelaporan;
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
3. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
4. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas; dan





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

5. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Walaupun Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain: Pengakuan pendapatan- LRA, Pengakuan pendapatan-LO, Pengakuan belanja, Pengakuan beban, Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian, Investasi, Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud, Kontrak-kontrak konstruksi, Kebijakan kapitalisasi pengeluaran, Kemitraan dengan pihak ketiga, Biaya penelitian dan pengembangan, Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri, Pembentukan dana cadangan, Pembentukan dana kesejahteraan pegawai, Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif diungkapkan. Perubahan





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

### **Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: Anggaran; Realisasi; Prosentase pencapaian ;Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;Perbandingan dengan periode yang lalu;Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut: Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian yang diperlukan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut: Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan- LO menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut: Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:

1. Perbandingan dengan periode yang lalu;
2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
3. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas;
4. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan; dan
5. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar,



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- c. Rincian yang diperlukan; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

### **Pengungkapan Informasi yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang diperlukan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk Penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

### **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

1. Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
3. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
4. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
5. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang ditanggulangi pemerintah daerah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

### Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
4. Kebijakan akuntansi yang penting terdiri dari: Entitas pelaporan, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh entitas pelaporan, dan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
5. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
  - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
  - b. Pengungkapan informasi yang diperlukan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
6. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran /penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua**

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 ditetapkan bahwa mulai Tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menggunakan Basis Akrua, berkenaan dengan perubahan basis akuntansi dari basis kas modifikasian yang masih digunakan untuk laporan keuangan tahun 2014 menjadi basis akrua. Pemerintah Kabupaten Barito Utara beedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi. Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan. Atas dasar hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan saldo akun-akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak dari Perubahan Kebijakan akuntansi diperlukan sebagai



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

koreksi tahun berjalan. Akun-akun Akrual yang belum disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2014 meliputi:

1. Beban Dibayar Dimuka;
2. Akumulasi Penyisihan Piutang;
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;
4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud;
5. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
6. Perbedaan nilai Persediaan sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi, yang semula menggunakan Harga Beli Terakhir menjadi menggunakan metode First In First Out (FIFO) yang dicatat secara periodik diperlakukan sebagai Koreksi tahun berjalan yang tersaji pada laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam Sub Koreksi Tahun Sebelumnya pada rincian Lain-lain.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Utara dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

##### **Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA**

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO**

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

##### **Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
2. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat daerah, pegawai negeri



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;

3. Belanja Barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
4. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda;
5. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
6. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
7. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud;
9. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
10. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah; dan
11. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kebijakan Akuntansi Beban**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO);
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
5. Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda;
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang;
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas;
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah daerah; dan
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

### **Kebijakan Akuntansi Transfer**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil milik pemerintah daerah;
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi;
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil kepada pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
3. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan;





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah;
5. Kurs adalah rasio pertukaran dua matauang;
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; dan
7. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

### **Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran; dan
2. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

### **Kebijakan Akuntansi Investasi**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal;
2. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, *deviden* dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
4. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
5. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
6. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

7. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu;
8. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan;
9. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi;
10. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/ dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya;
11. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi;
12. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen;
13. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
14. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya; dan
15. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

### **Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

### 1. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas pungutan: Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi, Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Piutang Retribusi, dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

### 2. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: Pemberian Pinjaman, Penjualan, Kemitraan, dan Pemberian fasilitas.

### 3. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Transfer Lainnya, Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, Piutang Transfer Antar Daerah, dan Piutang Kelebihan Transfer.

### 4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara ini, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

## Kebijakan Akuntansi Persediaan

### 1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

### 2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

#### 1. Definisi

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

#### 2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

##### a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

##### c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

3. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015.

### **Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah;
2. Aset Tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya;
3. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana;
4. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur;
5. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif;
6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
7. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
8. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur;
9. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti;
10. Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

- a. Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
  - b. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
11. Kurs adalah rasio pertukaran dua matauang;
  12. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah daerah;
  13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah;
  14. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi;
  15. Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum;
  16. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif;
  17. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang; dan
  18. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

### **Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

1. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah daerah atas kekayaan pemerintah daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

2. Ekuitas dicatat sebesar nilai transaksi. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah/dikurangi sulus/defisit dan koreksi;
3. Ekuitas disajikan pada neraca dalam kelompok ekuitas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan
4. Pengungkapan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: Kebijakan akuntansi ekuitas, Nilai awal ekuitas, Sulus/defisit, dan Nilai akhir ekuitas.





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Daerah yang diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengukuran terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

**5.1.1. Pendapatan Rp2.260.438.721.167,04**

Anggaran Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp1.917.108.048.047,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.260.438.721.167,04 atau 117,91% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp908.160.923.268,35 atau 67,16% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.352.277.797.898,69. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan – LRA	<b>1.917.108.048.047,00</b>	<b>2.260.438.721.167,04</b>	<b>117,91</b>	<b>1.352.277.797.898,69</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	102.512.679.816,00	94.692.794.725,87	92,37	108.396.505.775,09
Pendapatan Transfer	1.814.595.368.231,00	2.144.905.969.818,00	118,20	1.223.758.813.286,60



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	20.839.956.623,17	0,00	20.122.478.837,00

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

**Rp94.692.794.725,87**

Anggaran Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp102.512.679.816,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp94.692.794.725,87 atau 92,37% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp13.703.711.049,22 atau 12,64% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp108.396.505.775,09. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara terdiri dari:

**Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	21.706.872.729,00	24.903.662.174,70	114,73	20.200.409.777,20
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	14.724.760.817,00	9.026.715.028,00	61,30	10.131.945.418,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	11.614.597.000,00	477.599.093,96	4,11	10.058.366.983,00
Lain-lain PAD yang Sah – LRA	54.466.449.270,00	60.284.818.429,21	110,68	68.005.783.596,89
<b>Jumlah</b>	<b>102.512.679.816,00</b>	<b>94.692.794.725,87</b>	<b>92,37</b>	<b>108.396.505.775,09</b>

**5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah**

**Rp24.903.662.174,70**

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp21.706.872.729,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp24.903.662.174,70 atau 114,73% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp4.703.252.397,50 atau 23,28% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.200.409.777,20.

Dari 10 item Pajak yang dikelola BPPD dengan target pajak Daerah yang ditetapkan sebesar Rp24,903.662.174,70 dengan realisasi pajak tercapai melampaui 114,73 % yaitu Pajak Hotel tercapai sebesar 131,42 % dan Pajak Restoran tercapai sebesar 177,11 %.

Adapun beberapa faktor yang menghambat capaian target Pajak Daerah pada tahun 2023 Tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan WP untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi tingkat pencapaian penerimaan dari sektor pajak;
2. Baru pulih dari situasi pandemi covid;
3. Rendahnya daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak;



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

4. Adanya beberapa Objek pajak yang menutup usahanya;
5. Terbatas jumlah SDM dari aparatur pengelola pajak terutama untuk petugas pelayanan dan petugas lapangan;
6. Masih kurangnya Perangkat pendukung sarana dan prasarana untuk pengelolaan pajak daerah;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan perundang-undangan perpajakan;
8. Belum optimalnya pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
9. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak lain (Daerah lain dan lembaga pemerintahan lain);
10. Ketidak sesuaikan jumlah petugas dibandingkan dengan beban pekerjaan pelayanan yang harus dilayani; dan

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah  
Berdasarkan Objek Pajak Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Hotel	450.500.000,00	592.067.498,00	131,42	589.789.130,00
Pajak Restoran	6.526.680.330,00	11.559.497.593,70	177,11	8.316.220.747,20
Pajak Hiburan	350.000.000,00	330.872.800,00	94,54	290.597.002,00
Pajak Reklame	440.002.841,00	298.400.000,00	67,82	308.858.050,00
Pajak Penerangan Jalan	7.900.000.000,00	8.215.185.350,00	103,99	7.333.968.804,00
Pajak Parkir	75.000.000,00	84.357.400,00	112,48	67.422.300,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	41.720.100,00	83,44	38.171.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.899.164.101,00	1.127.693.848,00	59,38	626.815.460,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.116.361.365,00	1.666.370.925,00	78,74	1.455.765.472,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.899.164.092,00	987.496.660,00	52,00	1.172.801.312,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.706.872.729,00</b>	<b>24.903.662.174,70</b>	<b>114,73</b>	<b>20.200.409.777,20</b>

### 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

**Rp9.026.715.028,00**

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp14.724.760.817,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp9.026.715.028,00 atau 61,30% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp1.105.230.390,00 atau 10,91% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.131.945.418,00.

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Kabupaten Barito Utara dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincians ebagai berikut:

**Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Objek Pajak Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.211.255.991,00</b>	<b>1.360.190.858,00</b>	<b>42,36</b>	<b>1.136.065.152,00</b>
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	615.000.000,00	419.118.250,00	68,15	210.374.950,00
- Retribusi Persampahan/Kebersihan	750.000.000,00	339.300.000,00	45,24	346.727.154,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000.000,00	124.622.508,00	14,66	137.822.508,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	61.256.000,00	82.640.000,00	134,91	124.160.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	684.999.991,00	89.375.500,00	13,05	88.832.000,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	75.000.000,00	192.370.000,00	256,49	151.959.000,00
- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas	175.000.000,00	112.764.600,00	64,44	76.189.540,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>11.161.058.826,00</b>	<b>7.572.024.170,00</b>	<b>67,84</b>	<b>8.854.407.220,00</b>
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.078.779.673,00	1.050.670.770,00	50,54	914.415.220,00
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	13.410.785,00	0,00	0,00	180.000,00
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.018.868.368,00	6.127.613.000,00	76,41	7.450.965.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	550.000.000,00	288.590.400,00	52,47	326.077.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	500.000.000,00	105.150.000,00	21,03	162.770.000,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>352.446.000,00</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>26,81</b>	<b>141.473.046,00</b>
- Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	13.973.046,00
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	350.000.000,00	94.500.000,00	27,00	127.500.000,00
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.446.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.724.760.817,00</b>	<b>9.026.715.028,00</b>	<b>61,30</b>	<b>10.131.945.418,00</b>

**5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

**Rp477.599.093,96**

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp11.614.597.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp477.599.093,96 atau 4,11% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp9.580.767.889,04 atau 95,25% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.058.366.983,00.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 terinci



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

sebagai berikut:

**Tabel 5.5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.614.597.000,00	477.599.093,96	4,11	10.058.366.983,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.614.597.000,00</b>	<b>477.599.093,96</b>	<b>4,11</b>	<b>10.058.366.983,00</b>

Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan maka kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD hanya mencapai 0,37%.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari setoran bagi hasil laba Perusahaan Daerah Batara Membangun Tahun 2022 yang disetor Tahun 2023 dan setoran pembagian laba /Deviden Bank Kalteng Tahun Buku 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

**5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp60.284.818.429,21**

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp54.466.449.270,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp60.284.818.429,21 atau 110,68% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp7.720.965.167,68 atau 11,35% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp68.005.783.596,89.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.6 Lain-lain PAD yang Sah  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.400.000.000,00	194.302.421,00	13,88	960.000,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	267.700.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	285.702.016,00	71,43	201.255.600,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	268.087,00
Jasa Giro Kas Daerah	12.809.000.000,00	9.538.101.697,00	74,46	5.647.050.216,00
Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	14.105.861,00
Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (TGR)	0,00	0,00	0,00	10.988.611,00
Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	110.443.711,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	326.783.222,88	32,68	1.160.617.135,89
Pendapatan Denda Pajak Daerah	707.564.774,00	189.212.959,00	26,74	98.407.741,00
Pendapatan Denda Retribusi	542.343.774,00	16.881.900,00	3,11	25.622.300,00
Pendapatan dari Pengembalian	393.259,00	2.931.815.273,33	745.517,65	837.820.843,00
Pendapatan BLUD	30.030.000.000,00	40.586.958.712,00	135,15	59.376.226.789,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	790.400,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.577.147.463,00	160.401.804,00	2,12	192.594.450,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya.	0,00	0,00	0,00	54.181.852,00
Remunisasi	0,00	6.054.658.424,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>54.466.449.270,00</b>	<b>60.284.818.429,21</b>	<b>110,68</b>	<b>68.005.783.596,89</b>

**5.1.1.2. Pendapatan Transfer**

**Rp2.144.905.969.818,00**

Anggaran Pendapatan Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp1.814.595.368.231,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.144.905.969.818,00 atau 118,20% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp921.147.156.531,40 atau 75,27% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.223.758.813.286,60.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut.

**Tabel 5.7 Pendapatan Transfer  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.720.184.536.000,00	1.925.270.787.818,00	111,92	1.055.068.119.846,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	74.410.832.231,00	82.377.338.000,00	110,71	79.936.498.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	20.000.000.000,00	137.257.844.000,00	686,29	88.754.195.440,60
<b>Jumlah</b>	<b>1.814.595.368.231,00</b>	<b>2.144.905.969.818,00</b>	<b>118,20</b>	<b>1.223.758.813.286,60</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat  
Dana Perimbangan**

**Rp1.925.270.787.818,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp1.720.184.536.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.925.270.787.818,00 atau 111,92 % dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan pada tahun 2023 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp870.202.667.972,00 atau 82,48% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.055.068.110.846,00. Pagu dan realisasi transfer dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi hasil (DBH) – LRA	998.259.339.000,00	1.242.016.532.930,00	124,42	364.277.608.511,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	519.181.671.000,00	519.179.304.326,00	100,00	500.634.214.445,00
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)	202.743.526.000,00	164.074.950.562,00	80,93	190.156.296.890,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.720.184.536.000,00</b>	<b>1.925.270.787.818,00</b>	<b>111,92</b>	<b>1.055.068.119.846,00</b>

**5.1.1.2.1.1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1.242.016.532.930,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp998.259.339.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.242.016.532.930,00 atau 80,37% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp877.738.924.542,00 atau 240,95% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp364.277.608.388,00.

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan realisasi pendapatan bagian daerah hasil pajak dalam Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.9 Dana Bagi Hasil Pajak  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	74.719.929.000,00	99.965.772.842,00	133,79	111.518.113.607,00
DBH PPh Pasal 21	7.567.534.000,00	8.276.408.127,00	109,37	6.948.134.076,00
DBH PPh Pasal 25 dan pasal 29/WPSKPDN	0,00	62.148.949,00	0,00	55.901.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	123,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.184.215.000,00	418.503.170,00	35,34	233.938.370,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	1.052.520.496,00	0,00	2.705.300.296,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara	897.183.861.000,00	15.725.593.685,00	1,75	18.389.171.316,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
- Loundrent				
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Royalty	0,00	1.098.377.410.303,00	0,00	216.919.142.988,00
Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	5.791.949.907,00	0,00	5.291.689.924,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	16.263.436.000,00	10.794.108.117,00	66,37	46.152.600,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.340.364.000,00	1.552.117.211,00	115,80	2.170.064.211,00
<b>Jumlah</b>	<b>998.259.339.000,00</b>	<b>1.242.016.532.930,00</b>	<b>80,37</b>	<b>364.277.608.388,00</b>

**5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp519.179.304.326,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp519.181.671.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp519.179.304.326,00 atau 99,99% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp18.545.089.881,00 atau 3,70% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp500.634.214.445,00.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat dalam Tahun Anggaran 2023, yang menjadi hak Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari:

**Tabel 5.10 Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	519.181.671.000,00	519.179.304.326,00	99,99	500.634.214.445,00
<b>Jumlah</b>	<b>519.181.671.000,00</b>	<b>519.179.304.326,00</b>	<b>99,99</b>	<b>500.634.214.445,00</b>

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan Dana Alokasi Umumnya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

**5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp164.074.950.562,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp202.743.526.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp164.074.950.562,00 atau 80,93% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp26.081.346.328,00 atau 13,72% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp190.156.296.890,00.

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 yang diterima terdiri dari:

**Tabel 5.11 Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik	86.481.099.000,00	84.255.485.379,00	97,43	113.091.807.470,00
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik	116.262.427.000,00	79.819.465.183,00	68,65	77.064.489.420,00
<b>Jumlah</b>	<b>202.743.526.000,00</b>	<b>164.074.950.562,00</b>	<b>80,93</b>	<b>190.156.296.890,00</b>

**5.1.1.2.1.3.1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

**Rp84.255.485.379,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp84.481.099.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp84.255.485.379,00 atau 97,43%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 yang diterima terdiri dari:

**Tabel 5.12 Rincian Dana Alokasi Khusus  
Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	528.415.000,00	525.221.200,00	99,40	856.919.320,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	5.181.963.000,00	4.970.216.845,00	95,91	20.286.261.483,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	13.939.647.000,00	13.703.186.000,00	98,30	13.679.440.107,00
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	866.333.300,00
5	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	0,00	1.184.000.000,00	0,00	1.885.875.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	15.314.416.983,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pengendalian Penyakit	365.133.000,00	261.868.971,00	71,72	0,00
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penguatan Sistem Kesehatan	1.663.984.000,00	1.642.175.000,00	98,69	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan	1.369.709.000,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
	Percepatan Penurunan Stunting				
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.079.043.742,00
11	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	0,00	0,00	0,00	203.236.000,00
12	DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan /Renovasi Prasarana Fisik dasar Pembangunan Pertanian	19.680.430.000,00	19.384.425.763,00	98,50	13.088.327.460,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	37.187.255.500,00	0,00	0,00
14	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler jalan	38.329.064.000,00	0,00	0,00	14.008.455.260,00
15	DAK Fisik Bidang Air minum- Reguler	0,00	0,00	0,00	5.707.045.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	704.782.850,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	0,00	0,00	0,00	867.227.319,00
18	DAK Fisik Bidang Sanitasi - Reguler	0,00	0,00	0,00	3.200.000.000,00
19	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.284.313.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan	0,00	0,00	0,00	2.716.895.300,00
21	DAK Fisik Bidang Irigasi - Penugasan	5.422.754.000,00	5.397.136.100,00	99,53	3.816.330.800,00
22	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB reguler Peningkatan Kesiapan Sistem kesehatan	0,00	0,00	0,00	11.526.904.546,00
<b>Jumlah</b>		<b>86.481.099.000,00</b>	<b>84.255.485.379,00</b>	<b>97,43</b>	<b>113.091.807.470,00</b>

**5.1.1.2.1.3.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp79.819.465.183,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun yang



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp116.262.427.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp79.819.465.183,00 atau 68,65%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 yang diterima terdiri dari:

**Tabel 5.13 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.584.790.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.725.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	55.979.513.000,00	53.943.211.500,00	96,36	47.008.819.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.495.500.000,00	1.504.600.000,00	100,61	5.895.655,370,00
5	DAK Non Fisik-TKD Guru PNSD	5.007.215.000,00	5.007.215.000,00	100,00	3.284,765,000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.794.960.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	736.630.000,00	0,00	0,00	617.650.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	7.043.304.000,00	15.810.921.087,00	224,48	10,733,526,000,00
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	553.000.000,00	461.913.500,00	83,53	376.450.696,00
10	DAK Non Fisik- BOKKB- Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB	0,00	0,00	0,00	7,216,347,381,00
12	DAK Non Fisik-Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Akreditasi Puskesmas	16.053.816.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	142.130.180,00	32,39	367,443,000,00
16	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB- KB	2.976.960.000,00	2.147.893.016,00	81,22	938,696,973,00
17	DAK Non Fisik- Dana ketahanan pangan Dan pertanian	219.575.000,00	213.210.900,00	97,10	625,136,000,00
18	DAK Non Fisik- PK2UMK	318.370.000,00	318.370.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>116.262.427.000,00</b>	<b>79.819.465.183,00</b>	<b>68,65</b>	<b>77,064,489,420,00</b>

**5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

**Rp82.377.338.000,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp74.410.832.231,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp82.377.338.000,00 atau 110,71% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp2.440.840.000,00 atau 3,05% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp79.936.498.000,00.

**Tabel 5.14 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	5.794.231,00	5.794.231.000,00	100,000,00	2.461.865.000,00
Dana Desa	74.405.038.000,00	76.583.107.000,00	102,93	77.474.633.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.410.832.231,00</b>	<b>82.377.338.000,00</b>	<b>110,71</b>	<b>79.936.498.000,00</b>

**5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID)**

**Rp5.794.231.000,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp5.794.231,00 dengan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

realisasi yang dicapai sebesar Rp5.794.231.000,00 atau 100.000,00% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.332.366.000,00 atau 135,36% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.461.865.000,00

Pendapatan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yakni Dana Insentif Daerah, yang secara ringkas untuk Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.15 Dana Insentif Daerah (DID)**  
**Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah–(DID)	5.794.231,00	5.794.231.000,00	100.000,00	2.461.865.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.794.231,00</b>	<b>5.794.231.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.461.865.000,00</b>

**5.1.1.2.2.2. Dana Desa**

**Rp76.583.107.000,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp74.405.038,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp76.583.107.000,00 atau 102,9% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp891.526.000,00 atau 1,15% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp77.474.633.000,00.

Pendapatan yang berasal dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak, yang dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.16 Dana Desa**  
**Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana desa	74.405.038.000,00	76.583.107.000,00	102,93	79.936.498.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.405.038.000,00</b>	<b>76.583.107.000,00</b>	<b>102,93</b>	<b>76.583.107.000,00</b>

**5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi**

**Rp137.257.844.000,00**

Anggaran Transfer Pemerintah Provinsi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp137.257.844.000,00 atau 686,29% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Transfer pada tahun 2023 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp48.503.648.559,40 atau 54,65% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.754.195.440,60.

**Tabel 5.17 Transfer Pemerintah Provinsi**  
**Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.000.000.000,00	137.107.844.000,00	685,54	88.604.195.440,60
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>137.257.844.000,00</b>	<b>686,29</b>	<b>88.754.195.440,60</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp137.107.844.000,00**

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp137.107.844.000,00 atau 685,54% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp48.503.648.559,40 atau 54,74% dari Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.604.195.440,60. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.18 Pendapatan Bagi Hasil Pajak  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.000.000.000,00	137.107.844.000,00	685,54	88.604.195.440,60
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>137.107.844.000,00</b>	<b>685,54</b>	<b>88.754.195.440,60</b>

**5.1.1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp150.000.000,00**

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp0,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,00% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 tidak mengalami Kenaikan dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp150.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 terinci sebagai berikut.

**Tabel 5.19 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah berupa bantuan program manunggal membangun desa.

**5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp20.839.956.623,17**

Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp0,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp20.839.956.623,17 atau 0,00% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp726.224.786,17 atau 3,61% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.122.478.837,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 berasal dari pihak ketiga (Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri) dan pendapatan Hibah Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yakni berupa dana BOS dan Bansos Pendidikan yang tidak dianggarkan dalam APBD yang wajib disajikan dalam Laporan Realisasi APBD

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02 yang disajikan sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 5.20 Lain-lain Pendapatan Yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	20.839.956.623,17	0,00	20.113.731.837,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.747.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839.956.623,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.122.478.837,00</b>

**5.1.2. Belanja**

**Rp1.666.102.458.458,42**

Anggaran Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp2.029.907.824.098,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.666.102.458.458,42 atau 82,08% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp556.016.021.712,42 atau 50,09% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.268.831.766.307,23.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.21 Realisasi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Operasi	1.276.223.590.386,00	1.053.820.269.567,00	82,57	816.703.080.907,00
Belanja Modal	753.125.573.302,00	612.282.188.891,42	81,30	293.383.355.839,00
Belanja Tak Terduga	558.660.410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.029.907.824.098,00</b>	<b>1.666.102.458.458,42</b>	<b>82,08</b>	<b>1.110.086.436.746,00</b>

**5.1.2.1. Belanja Operasi**

**Rp1.053.820.269.567,00**

Anggaran Belanja Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp1.276.223.590.386,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.053.820.269.567,00 atau 82,57% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp237.117.188.660,00 atau 29,03% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp816.703.080.907,00.

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 5.22 Realisasi Belanja Operasi**  
**Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	613.600.891.474,00	480.012.275.530,00	78,23	433.763.233.912,00
Belanja Barang dan Jasa	544.442.351.190,00	468.893.854.067,00	86,12	347.403.933.299,00
Belanja Subsidi	1.000.200.000,00	23.500.000,00	2,35	19.708.000,00
Belanja Hibah	114.544.813.322,00	102.335.824.376,00	89,34	33.106.872.821,00
Belanja Bantuan Sosial	2.635.334.400,00	2.554.815.594,00	96,94	2.409.332.875,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.276.223.590.386,00</b>	<b>1.053.820.269.567,00</b>	<b>82,57</b>	<b>816.703.080.907,00</b>

Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.276.223.590.386,00 telah terealisasi Rp1.053.820.269.567,00 atau 82,57% dari Anggaran Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp237.117.188.660,00 atau 29,03% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp816.703.080.907,00 dengan rincian dan penjelasan disajikan sebagai berikut.

**5.1.2.1.1. Belanja Pegawai**

**Rp480.012.275.530,00**

Anggaran Belanja Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp613.600.891.474,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp480.012.275.530,00 atau 78,23% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp46.249.041.618,00 atau 10,66% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp433.763.233.912,00.

Rincian Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan dan anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dan Belanja Honorarium PNS/Non PNS dan Uang Lembur dengan Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 pada SKPD Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.23 Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Per OPD**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	305.904.935.708,00	235.944.409.927,00	77,13	224.312.024.811,00
2	DINAS KESEHATAN	92.980.791.827,00	73.260.339.369,00	78,79	61.251.527.122,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.654.164.855,00	10.120.827.492,00	86,84	8.547.015.440,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.873.490.588,00	3.411.552.389,00	88,07	2.930.158.737,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.001.279.709,00	2.270.943.551,00	75,67	2.353.310.949,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.860.615.024,00	4.826.855.318,00	99,31	3.797.608.331,00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.062.059.298,00	1.735.439.764,00	42,72	0,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.730.874.677,00	2.894.227.576,00	77,58	2.162.155.141,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.439.597.361,00	3.960.752.385,00	89,21	3.675.740.274,00
10	DINAS TENAGA KERJA,	4.535.545.675,00	3.432.040.549,00	75,67	3.300.203.389,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
	TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM				
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	5.717.447.393,00	4.939.556.901,00	86,39	4.466.799.729,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.831.047.136,00	4.265.379.312,00	88,29	3.754.606.439,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.424.617.640,00	2.640.583.778,00	77,11	2.478.177.704,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.471.532.909,00	3.530.087.965,00	78,95	3.263.093.153,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5.484.673.814,00	4.562.919.087,00	83,19	4.374.299.185,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3.019.506.101,00	2.133.633.391,00	70,66	1.968.079.536,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.370.135.317,00	2.469.300.061,00	73,27	2.599.927.665,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.718.347.272,00	3.331.622.304,00	89,60	2.670.205.373,00
19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.025.839.950,00	3.414.161.221,00	84,81	3.122.399.453,00
20	DINAS PERTANIAN	19.065.353.886,00	15.522.290.851,00	81,42	12.936.081.444,00
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4.354.213.722,00	3.385.260.674,00	77,75	3.042.829.137,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	16.414.945.245,00	12.879.124.002,00	78,46	11.870.205.001,00
23	SEKRETARIAT DPRD	18.756.123.447,00	14.850.957.536,00	79,18	14.264.875.286,00
24	KEC. TEWEH TENGAH	3.951.046.241,00	3.482.746.369,00	88,15	3.119.717.164,00
25	KEC. TEWEH TIMUR	2.135.299.167,00	1.662.200.735,00	77,84	1.500.163.303,00
26	KEC. LAHEI	3.015.106.647,00	2.836.573.527,00	94,08	2.564.379.932,00
27	KEC. GUNUNG TIMANG	2.824.080.561,00	2.033.099.985,00	71,99	2.055.064.832,00
28	KEC. MONTALLAT	3.703.235.954,00	3.326.141.209,00	89,82	2.703.456.780,00
29	KEC. GUNUNG PUREI	2.113.404.694,00	1.453.511.694,00	68,78	1.341.182.653,00
30	KEC. TEWEH BARU	3.252.804.658,00	2.987.560.456,00	91,85	2.217.945.628,00
31	KEC. TEWEH SELATAN	2.063.757.961,00	1.511.993.973,00	73,26	1.356.487.719,00
32	KEC. LAHEI BARAT	1.878.865.392,00	1.472.192.957,00	78,36	1.281.192.031,00
33	INSPEKTORAT	6.837.299.741,00	6.351.358.944,00	92,89	5.196.585.869,00
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.053.632.962,00	3.092.629.618,00	76,29	2.847.797.880,00
35	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	5.027.636.338,00	4.647.983.096,00	92,45	3.948.818.590,00
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	33.223.567.199,00	22.580.938.048,00	67,97	18.045.406.830,00
37	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.824.015.405,00	2.791.079.516,00	72,99	2.443.711.402,00
	<b>Jumlah</b>	<b>613.600.891.474,00</b>	<b>480.012.275.530,00</b>	<b>78,23</b>	<b>433.763.233.912,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai per objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.24 Realisasi Belanja Pegawai per Objek Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	351.710.171.703,00	269.046.843.183,00	76,50	256.944.608.360,00
Tambahan Penghasilan ASN	161.608.107.998,00	125.028.484.815,00	77,37	89.021.900.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.237.568.437,00	72.729.735.650,00	87,33	74.429.777.467,00
Belanja Gaji dan	14.592.258.289,00	12.068.053.474,00	82,70	11.962.719.723,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Tunjangan DPRD				
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	767.719.328,00	141.953.408,00	18,49	181.274.484,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	626.050.719,00	561.600.000,00	89,71	783.823.278,00
Belanja Pegawai BLUD	1.059.015.000,00	435.605.000,00	41,13	439.130.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>613.600.891.474,00</b>	<b>480.012.275.530,00</b>	<b>78,23</b>	<b>433.763.233.912,00</b>

**5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

**Rp468.893.854.067,00**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp544.442.351.190,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp468.893.854.067,00 atau 86,12% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp121.489.920.768,00 atau 34,97% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp347.403.933.299,00.

Rincian belanja barang dan jasa berdasarkan SKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.25 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan OPD Tahun Anggaran 2023**

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	56.674.262.041,00	52.018.198.404,17	91,78	40.638.126.725,00
2	DINAS KESEHATAN	81.990.850.383,00	54.511.242.976,00	66,48	63.523.078.100,00
3	RSUD BLUD	58.615.946.850,00	53.451.781.687,00	91,19	69.487.452.684,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64.040.528.097,00	56.212.560.304,00	87,78	29.984.989.028,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.665.454.810,00	5.187.432.597,00	91,56	1.117.997.153,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.766.839.750,00	5.375.938.384,00	93,22	2.142.043.473,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.912.481.225,00	4.749.464.329,00	96,68	4.219.768.460,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.289.208.300,00	2.432.409.598,00	73,95	0,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.938.128.533,00	11.796.462.788,00	84,63	11.139.274.382,00
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.789.835.555,00	8.081.863.386,00	74,90	3.079.312.670,00
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	6.801.758.752,00	5.793.621.364,00	85,18	3.241.939.830,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	7.413.067.308,00	6.738.973.257,00	90,91	3.076.240.782,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.129.341.115,00	17.755.187.796,00	84,03	7.137.683.831,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.610.860.515,00	2.500.948.764,00	95,79	1.560.335.570,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.887.032.123,00	6.584.639.192,00	83,49	3.707.232.776,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	4.957.940.000,00	4.565.224.369,00	92,08	2.782.990.549,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	11.196.534.637,00	10.499.338.070,00	93,77	3.076.322.569,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	3.095.531.970,00	2.704.442.409,00	87,37	2.121.486.342,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
	SATU PINTU				
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.804.284.914,00	2.504.885.339,00	89,32	1.147.784.581,00
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.782.206.825,00	8.943.782.942,00	91,43	4.887.314.623,00
21	DINAS PERTANIAN	37.533.678.683,00	36.900.618.661,00	98,31	17.646.715.931,00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5.529.857.820,00	4.832.613.495,00	87,39	3.706.638.371,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	31.659.417.090,00	29.271.557.180,00	92,46	19.626.846.795,00
24	SEKRETARIAT DPRD	36.813.838.864,00	31.252.746.826,00	84,89	21.729.411.429,00
25	KEC. TEWEH TENGAH	3.263.220.000,00	3.204.110.946,83	98,19	1.862.124.291,00
26	KEC. TEWEH TIMUR	489.423.800,00	464.467.250,00	94,90	563.467.500,00
27	KEC. LAHEI	1.462.799.796,00	1.373.812.985,00	93,92	925.122.267,00
28	KEC. GUNUNG TIMANG	1.585.963.300,00	1.237.098.000,00	78,00	1.078.772.042,00
29	KEC. MONTALLAT	1.836.264.247,00	1.554.449.124,00	84,65	1.222.828.203,00
30	KEC. GUNUNG PUREI	928.306.697,00	762.098.200,00	82,10	521.371.175,00
31	KEC. TEWEH BARU	1.828.956.207,00	1.802.252.251,00	98,54	1.397.499.050,00
32	KEC. TEWEH SELATAN	896.717.758,00	874.085.187,00	97,48	592.938.050,00
33	KEC. LAHEI BARAT	1.191.059.582,00	1.178.728.932,00	98,96	700.160.162,00
34	INSPEKTORAT	9.160.768.115,00	8.058.069.870,00	87,94	3.354.990.094,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.912.212.441,00	4.333.782.780,00	88,22	2.902.958.149,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	3.486.354.000,00	3.248.693.700,00	93,18	2.441.268.519,00
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	9.509.612.337,00	8.229.931.328,00	86,54	6.154.161.682,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.991.806.750,00	7.908.339.376,00	87,95	2.905.285.461,00
	<b>Jumlah</b>	<b>544.442.351.190,00</b>	<b>468.893.854.067,00</b>	<b>86,12</b>	<b>347.403.933.299,00</b>

Sedangkan Rincian Belanja Barang dan Jasa per Objek Belanja dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.26 Belanja Barang dan Jasa Per objek Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	134.726.729.631,00	120.566.478.315,00	89,49	57.366.472.235,00
2	Belanja Barang Tak Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	153.800.807.111,00	130.778.312.184,00	85,03	110.997.403.770,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.103.889.894,00	10.656.882.149,00	88,05	8.312.082.897,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.160.600.000,00	889.175.000,00	76,61	234.920.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.012.304.000,00	617.957.583,00	61,04	222.107.270,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	13.500.000,00	90,00	1.000.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.291.236.173,00	11.860.790.810,00	96,50	457.152.650,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.234.800.000,00	1.171.619.000,00	94,88	1.405.595.750,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	14.650.000,00	9.058.081,00	61,83	6.877.267,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	40.000.000,00	80,00	0,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.011.968.000,00	5.927.798.286,00	84,54	2.643.731.888,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	154.300.000,00	136.359.613,00	88,37	123.948.334,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.548.431.865,00	7.637.154.879,00	89,34	4.280.076.236,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.457.386.298,00	7.546.386.444,00	89,23	2.615.866.301,00
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.130.440.726,00	9.323.012.408,00	83,76	4.041.678.900,00
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00	
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	129.137.404.231,00	102.438.842.798,00	79,32	67.047.732.545,00
23	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	708.100.000,00	651.353.765,00	91,99	3.832.100.000,00
24	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.057.465.486,00	3.123.024.878,00	76,97	1.461.496.016,00
25	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.723.120.180,00	19.342.738.726,00	93,34	19.074.629.317,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.086.609.595,00	36.153.809.148,00	94,93	63.279.061.923,00
	<b>Jumlah</b>	<b>544.442.351.190,00</b>	<b>468.893.854.067,00</b>	<b>86,12</b>	<b>347.403.933.299,00</b>

**5.1.2.1.3. Belanja Subsidi Rp23.500.000,00**

Anggaran Belanja Subsidi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp1.000.200.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp23.500.000,00 atau 2,35% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD.

Belanja Subsidi untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara merealisasikan baik kepada Anggota Masyarakat dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.27 Belanja Subsidi  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.000.200.000,00	23.500.000,00	2,35	19.708.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000.200.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>2,35</b>	<b>19.708.000,00</b>

**5.1.2.1.4. Belanja Hibah Rp102.335.824.376,00**

Anggaran Belanja Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp114.544.813.322,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp102.335.824.376,00 atau 89,34% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp69.228.951.555,00 atau 209,11% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.106.872.821,00.



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 merupakan Belanja Hibah yang berupa uang maupun barang Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta sebagaimana Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 166, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.28 Belanja Hibah  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.379.761.504,00	0,00	0,00	180.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	150.000.000,00	149.087.500,00	99,39	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	95.086.577.826,00	91.402.457.194,00	96,13	22.225.243.500,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.746.590.000,00	1.070.000.000,00	22,54	3.947.399.639,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.335.000.000,00	4.830.000.000,00	90,53	1.895.000.000,00
6	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Dasar	4.120.137.500,00	3.965.275.000,00	96,24	3.933.212.500,00
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	889.974.500,00	427.800.000,00	48,07	434.812.500,00
9	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	736.771.992,00	491.204.682,00	66,67	491.204.682,00
	<b>Jumlah</b>	<b>114.544.813.322,00</b>	<b>102.335.824.376,00</b>	<b>89,34</b>	<b>33.106.872.821,00</b>

### 5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

**Rp2.554.815.594,00**

Anggaran Belanja Subsidi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp2.635.334.400,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.554.815.594,00 atau 96,94% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD.





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 5.29 Belanja Bantuan Sosial**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	124.750.000,00	90.990.994,00	72,94	1.261.430.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.302.784.400,00	1.256.024.600,00	96,41	240.102.875,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.207.800.000,00	1.207.800.000,00	100,00	907.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.635.334.400,00</b>	<b>2.554.815.594,00</b>	<b>96,94</b>	<b>2.409.332.875,00</b>

**5.1.2.2. Belanja Modal**

**Rp612.282.188.891,42**

Anggaran Belanja Modal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp753.125.573.302,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp612.282.188.891,42 atau 81,30% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp318.898.833.052,42 atau 108,70% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp293.383.355.839,00.

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.30 Belanja Modal**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	29.342.043.504,00	1.933.195.040,00	6,59	380.061.720,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	112.104.964.736,00	105.955.547.150,13	94,51	66.476.780.468,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.171.568.332,00	143.947.870.107,00	93,37	113.547.863.236,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	453.984.745.810,00	357.040.716.674,29	78,65	112.512.217.795,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.457.250.920,00	2.358.443.720,00	95,98	466.432.620,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.065.000.000,00	1.046.416.200,00	98,26	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>753.125.573.302,00</b>	<b>612.282.188.891,42</b>	<b>81,30</b>	<b>293.383.355.839,00</b>

**5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah**

**Rp1.933.195.040,00**

Anggaran Belanja Modal Tanah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp29.342.043.504,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.933.195.040,00 atau 6,59% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.553.133.320,00 atau 408,65% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp380.061.720,00.





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Realisasi belanja modal tanah Tahun 2023 terdapat pada satu SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan rincian berikut.

**Tabel 5.31 Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan OPD  
Tahun Anggaran 2023**

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	28.320.543.504,00	1.144.455.040,00	4,04	231.976.720,00
3	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	916.500.000,00	788.740.000,00	86,06	148.085.000,00
4	KECAMATAN LAHEI	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	KECAMATAN TEWEH BARU	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.342.043.504,00</b>	<b>1.933.195.040,00</b>	<b>6,59</b>	<b>380.061.720,00</b>

### 5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**Rp105.955.547.150,13**

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp112.104.964.736,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp105.955.547.150,13 atau 94,51% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp39.478.766.682,13 atau 59,39% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.476.780.468,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.32 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD  
Tahun Anggaran 2023**

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	3.750.169.900,00	3.491.891.190,00	93,11	3.147.150.525,00
2	DINAS KESEHATAN	9.054.139.899,00	7.642.015.666,43	84,40	17.690.709.381,00
3	RSUD BLUD	8.730.430.000,00	8.279.985.009,00	94,84	3.442.847.573,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.108.491.250,00	14.610.899.938,00	96,71	13.803.227.600,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	679.500.000,00	651.400.000,00	95,86	0,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.072.437.358,00	1.004.119.358,00	93,63	17.937.500,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.630.403.629,00	1.577.330.189,00	96,74	321.710.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12.575.516.345,00	12.395.236.000,00	98,57	0,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.195.102.426,00	4.151.476.000,00	98,96	13.887.208.150,00
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.239.901.050,00	1.207.445.875,00	97,38	25.000.000,00
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	144.500.000,00	143.640.000,00	99,40	437.754.550,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	455.429.470,00	450.487.375,00	98,91	455.400.000,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.463.767.310,00	6.958.660.330,00	93,23	2.983.234.199,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	1.080.525.000,00	1.067.852.000,00	98,83	213.625.000,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	644.268.100,00	611.213.000,00	94,87	43.420.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	4.379.712.500,00	4.270.104.400,00	97,50	780.108.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	7.500.272.500,00	6.643.705.252,00	88,58	305.900.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	849.570.000,00	840.529.000,00	98,94	0,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.278.957.038,00	1.273.447.838,00	99,57	762.517.000,00
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	746.088.500,00	740.980.700,00	99,32	448.694.300,00
21	DINAS PERTANIAN	927.964.200,00	890.576.053,00	95,97	583.235.700,00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	481.216.695,00	442.817.500,00	92,02	49.506.000,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	7.262.910.000,00	6.935.897.300,00	95,50	3.891.540.581,00
24	SEKRETARIAT DPRD	3.555.974.610,00	3.223.106.172,70	90,64	872.979.900,00
25	KEC. TEWEH TENGAH	628.013.125,00	616.967.118,00	98,24	140.842.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
26	KEC. TEWEH TIMUR	243.749.100,00	81.417.100,00	33,40	11.110.000,00
27	KEC. LAHEI	574.345.450,00	364.394.700,00	63,45	71.210.000,00
28	KEC. GUNUNG TIMANG	183.062.500,00	167.937.000,00	91,74	0,00
29	KEC. MONTALLAT	400.591.174,00	384.002.049,00	95,86	264.131.000,00
30	KEC. GUNUNG PUREI	749.937.305,00	708.309.000,00	94,45	45.618.750,00
31	KEC. TEWEH BARU	392.946.893,00	387.668.285,00	98,66	103.244.375,00
32	KEC. TEWEH SELATAN	198.378.500,00	195.921.500,00	98,76	30.000.000,00
33	KEC. LAHEI BARAT	79.911.500,00	79.400.000,00	99,36	0,00
34	INSPEKTORAT	5.009.687.044,00	4.903.734.302,00	97,89	109.522.448,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.581.144.115,00	2.550.265.950,00	98,80	725.608.786,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2.065.500.000,00	2.053.450.000,00	99,42	189.130.000,00
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.777.970.000,00	2.596.245.000,00	93,46	476.686.650,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.412.480.250,00	1.361.019.000,00	96,36	145.970.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>112.104.964.736,00</b>	<b>105.955.547.150,13</b>	<b>94,51</b>	<b>66.476.780.468,00</b>

Sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.33 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Objek  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar Darat	7.910.000.000,00	7.718.025.000,00	97,57	11.004.385.150,00
Belanja Modal Alat Bantu	244.070.000,00	232.100.000,00	95,10	480.829.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	52.941.732.443,00	51.044.762.981,00	96,42	25.702.304.595,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	638.168.000,00	429.575.000,00	67,31	115.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	107.000.000,00	105.700.000,00	98,79	50.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	41.292.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	43.700.000,00	42.950.000,00	98,28	1.212.150.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	334.019.375,00	298.113.958,00	89,25	48.120.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor	1.814.427.015,00	1.753.849.600,00	96,66	441.368.100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.719.512.742,00	8.455.494.191,43	96,97	3.205.632.593,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.177.399.510,00	3.072.626.174,00	96,70	260.620.625,00
Belanja Modal Alat Studio	2.825.972.600,00	2.660.507.540,00	94,14	1.175.474.295,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	359.390.250,00	347.526.000,00	96,70	32.977.900,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	62.000.000,00	53.050.000,00	85,56	50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	60.500.000,00	59.075.000,00	97,64	0,00
Belanja Alat Kedokteran	5.215.185.680,00	4.967.831.009,00	95,26	204.663.375,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.972.950.980,00	1.052.972.151,00	53,37	12.927.285.294,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.536.906.875,00	1.363.789.100,00	88,74	1.780.934.882,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	360.000.000,00	349.260.000,00	97,02	178.213.900,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4.000.000,00	3.250.000,00	81,25	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	129.000.000,00	129.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	1.429.669.900,00	1.395.803.500,00	97,63	1.305.780.900,00
Belanja Modal Komputer Unit	9.139.181.585,00	8.819.690.744,00	96,50	3.249.548.706,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	8.312.389.395,00	6.967.189.855,70	83,82	1.762.938.029,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	314.345.286,00	290.770.246,00	92,50	216.121.850,00
Belanja Modal Alat Pelindung	757.008.100,00	728.525.000,00	96,24	416.981.274,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	144.500.000,00
Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat	2.942.935.000,00	2.891.814.900,00	98,26	410.908.000,00
Belanja Modal Alat SAR	403.500.000,00	374.350.000,00	92,78	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olah Raga	150.000.000,00	149.589.200,00	99,73	6.950.000,00
Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut	200.000.000,00	198.356.000,00	99,18	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Peralatan Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Peralatan Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	51.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>112.104.964.736,00</b>	<b>105.955.547.150,13</b>	<b>94,51</b>	<b>66.476.780.468,00</b>

**5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

**Rp143.947.870.107,00**

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp154.171.568.332,00 dengan realisasi



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

yang dicapai sebesar Rp143.947.870.107,00 atau 93,37% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.400.006.871,00 atau 26,77% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp113.547.863.236,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.34 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per OPD  
Tahun Anggaran 2023**

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	50.212.644.500,00	49.030.171.945,00	97,65	36.720.814.047,00
2	DINAS KESEHATAN	5.256.500.000,00	5.234.353.971,00	99,58	18.774.863.949,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.710.495.400,00	75.499.403.264,00	90,19	43.644.023.609,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	270.000.000,00	268.800.000,00	99,56	0,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	75.000.000,00	44.886.000,00	59,85	0,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	153.271.000,00	151.491.000,00	98,84	49.739.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	250.000.000,00	29.526.000,00	11,81	1.974.757.403,00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.000.000,00	48.693.000,00	97,39	0,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	2.115.015.790,00	2.103.526.000,00	99,46	0,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	994.357.000,00	827.990.000,00	83,27	209.962.750,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	2.940.000.000,00	2.919.618.600,00	99,31	641.161.500,00
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	1.318.600.000,00	1.246.729.850,00	94,55	0,00
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	225.000.000,00	223.170.000,00	99,19	1.031.637.500,00
14	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.390.000.000,00	1.336.439.267,00	96,15	4.431.455.118,00
15	DINAS PERTANIAN	597.800.000,00	596.568.000,00	99,79	5.097.412.190,00
16	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	744.500.000,00	740.327.250,00	99,44	160.244.000,00
17	SEKRETARIAT DPRD	1.345.100.000,00	1.329.859.750,00	98,87	675.828.170,00
18	KEC. TEWEH TENGAH	125.000.000,00	50.000.000,00	40,00	0,00
19	KEC. LAHEI	159.000.000,00	155.900.000,00	98,05	99.964.000,00
20	KEC. MONTALLAT	1.016.800.000,00	1.010.877.210,00	99,42	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022(Rp)
21	KEC. TEWEH BARU	153.964.642,00	33.960.000,00	22,06	0,00
22	KEC. LAHEI BARAT	1.000.000.000,00	997.393.000,00	99,74	0,00
23	INSPEKTORAT	68.520.000,00	68.186.000,00	99,51	0,00
24	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>154.171.568.332,00</b>	<b>143.947.870.107,00</b>	<b>93,37</b>	<b>113.547.863.236,00</b>

Sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.35 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Objek Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.371.828.332,00	130.426.828.507,00	92,92	111.304.682.236,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.200.300.000,00	9.029.637.400,00	98,15	1.332.784.000,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol Pasti	4.599.440.000,00	4.491.404.200,00	97,65	874.397.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan BangunanRambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>154.171.568.332,00</b>	<b>143.947.870.107,00</b>	<b>93,37</b>	<b>113.547.863.236,00</b>

**5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp357.040.716.674,29**

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp453.984.745,810,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp357.040.716.674,29 atau 78,65% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp244.528.498.879,29 atau 217,34% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp112.512.217.795,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 5.36 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD  
Tahun Anggaran 2023**

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	330.000.000,00	239.854.750,00	72,68	50.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	1.345.806.000,00	1.332.600.000,00	99,02	4.647.400.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	448.602.012.860,00	351.860.723.029,29	78,43	107.135.171.362,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.142.539.200,00	1.135.992.300,00	99,43	429.512.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	887.950.000,00	831.686.000,00	93,66	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	250.000.000,00	248.780.000,00	99,51	0,00
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	90.000.000,00	89.397.000,00	99,33	0,00
8	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	425.000.000,00	411.742.000,00	96,88	0,00
9	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	179.349.000,00
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
11	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	59.785.433,00
12	KEC. TEWEH TENGAH	160.000.000,00	159.976.700,00	99,99	0,00
13	KEC. LAHEI	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	0,00
14	KEC. MONTALLAT	471.370.000,00	450.529.200,00	95,52	0,00
15	KEC. TEWEH BARU	119.067.750,00	118.875.749,00	99,84	0,00
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.000.000,00	49.559.946,00	99,12	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>453.984.745.810,00</b>	<b>357.040.716.674,29</b>	<b>78,65</b>	<b>112.512.217.795,00</b>

Sedangkan realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per Objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.37 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Objek  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	141.526.905.410,00	138.162.571.610,00	97,62	35.897.165.172,00
2	Belanja Modal Jembatan	274.267.667.600,00	181.258.918.520,29	66,09	55.060.162.510,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.485.142.800,00	5.460.304.800,00	99,55	4.265.160.800,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00	0,00	0,00	617.882.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.746.354.000,00	12.630.121.199,00	99,09	4.462.323.900,00
6	Belanja Modal Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Pengembangan Sumber Air				
7	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.015.806.000,00	4.806.416.500,00	95,83	996.000.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.777.870.000,00	10.611.357.150,00	98,46	1.171.251.800,00
9	Belanja Modal Bangunan Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
11	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	64.550.000,00
12	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.720.000.000,00	3.667.093.249,00	98,58	6.266.536.180,00
15	Belanja Modal Jaringan Listrik	395.000.000,00	393.933.646,00	99,73	3.666.185.433,00
16	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>453.984.745.810,00</b>	<b>357.040.716.674,29</b>	<b>78,65</b>	<b>112.512.217.795,00</b>

**5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

**Rp2.358.443.720,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp2.457.250.920,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.358.443.720,00 atau 95,98% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.892.011.100,00 atau 405,63% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp466.432.620,00.

**Tabel 5.38 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per OPD Tahun Anggaran 2023**

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	466.249.920,00	392.006.520,00	84,08	323.969.620,00
5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	124.000.000,00	122.856.200,00	99,08	0,00
6	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	103.350.000,00	91.250.000,00	88,29	123.963.000,00
7	DINAS PERTANIAN	1.514.471.000,00	1.504.071.000,00	99,31	0,00
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00
9	SEKRETARIAT DAERAH	53.000.000,00	52.080.000,00	98,26	0,00
10	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
11	KEC. TEWEH TENGAH	42.680.000,00	42.680.000,00	100,00	0,00
12	KEC. LAHEI	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.457.250.920,00</b>	<b>2.358.443.720,00</b>	<b>95,98</b>	<b>466.432.620,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Sedangkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.39 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Objek Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	542.249.920,00	467.262.720,00	86,17	323.969.620,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Micro	297.180.000,00	295.860.000,00	99,56	0,00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	103.350.000,00	91.250.000,00	88,29	103.763.000,00
5	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Renovasi	1.514.471.000,00	1.504.071.000,00	99,31	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.457.250.920,00</b>	<b>2.358.443.720,00</b>	<b>95,98</b>	<b>466.432.620,00</b>

**5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya**

**Rp1.046.416.200,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp1.065.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.046.416.200,00 atau 98,26% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp722.446.580,00 atau 223,00% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp323.969.620,00

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.40 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per OPD Tahun Anggaran 2023**

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	98.527.000,00	98,53
2	DINAS PERHUBUNGAN	80.000.000,00	79.254.000,00	99,07
3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	50.000.000,00	48.500.000,00	97,00
4	SEKRETARIAT DPRD	175.000.000,00	163.215.000,00	0,00
5	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	497.946.000,00	99,59
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	160.000.000,00	158.974.200,00	99,36
	<b>Jumlah</b>	<b>1.065.000.000,00</b>	<b>1.046.416.200,00</b>	<b>98,26</b>

Sedangkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.41 Realisasi Belanja Modal Lainnya Per Objek Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.065.000.000,00	1.046.416.200,00	98,26	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.1.2.3. Belanja Tak Terduga**

**Rp0,00**

Anggaran Belanja Tak Terduga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp558.660.410,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 terinci sebagai berikut.

**Tabel 5.42 Belanja Tak Terduga  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tak Terduga	558.660.410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>558.660.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.1.3. Belanja Transfer**

**Rp230.307.693.912,24**

Anggaran Belanja Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp230.282.302.355,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp230.307.693.912,24 atau 100,01% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.562.364.351,01 atau 45,08% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar 158.745.329.561,23.

**Tabel 5.43 Transfer /Bagi Hasil ke Desa  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	3.643.163.355,00	2.788.734.312,24	76,55	2.441.566.961,23
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	226.639.139.000,00	227.518.959.600,00	100,39	156.303.762.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>230.282.302.355,00</b>	<b>230.307.693.912,24</b>	<b>100,01</b>	<b>158.745.329.561,23</b>

**5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pajak**

**Rp2.788.734.312,24**

Anggaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp3.643.163.355,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.788.734.312,24 atau 76,55% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp347.167.351,01 atau 14,22% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.441.566.961,23.

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 terinci sebagai berikut.

**Tabel 5.44 Transfer Bagi Hasil  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa	2.170.687.273,00	1.857.210.747,37	85,56	1.592.745.954,31
2	Bagi Hasil Retribusi Kepada	1.472.476.082,00	931.523.564,87	63,26	848.821.006,92



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Pemerintah Desa				
	<b>Jumlah</b>	<b>3.643.163.355,00</b>	<b>2.788.734.312,24</b>	<b>76,55</b>	<b>2.441.566.961,23</b>

Kenaikan Realisasi Tahun Anggaran 2022 merupakan transfer atas perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa.

**5.1.3.2. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp227.518.959.600,00**

Anggaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyajikan sebesar Rp226.639.139.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp227.518.959.600,00 atau 100,39% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.215.197.000,00 atau 45,56% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar 156.303.762.600,00.

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 terdiri Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.45 Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Provinsi	490.000.000,00	490.000.000,00	100,00	485.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota ke Desa	0,00	0,00	0,00	77.474.633.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota ke Desa	226.149.139.000,00	227.028.959.600,00	100,39	78.344.129.600,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>226.639.139.000,00</b>	<b>227.518.959.600,00</b>	<b>100,39</b>	<b>156.303.762.600,00</b>

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kalimantan Tengah diperuntukkan sewa *transponder* satelit (Televisi) Tahun Anggaran 2023 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/01/2023 tanggal 2 Januari 2023.

**5.1.4. Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran Rp364.028.568.796,38**

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperoleh Surplus sebesar Rp364.028.568.796,28 yang diperoleh dari realisasi Pendapatan sebesar Rp2.260.438.721.167,04 Belanja sebesar Rp1.666.102.458.458,42 dan Transfer sebesar Rp230.307.693.912,24.

**5.1.5. Pembiayaan Rp438.273.128.136,85**

Anggaran Pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

menyajikan sebesar Rp438.273.128.138,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp438.273.128.136,85 atau 100,00 %realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pembiayaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp56.446.031.591,46 atau 14,78% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp381.827.096.545,39.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.46 Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	465.273.128.137,00	465.273.128.136,85	100,00	384.827.096.545,39
Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>438.273.128.137,00</b>	<b>438.273.128.136,85</b>	<b>100,00</b>	<b>381.827.096.545,39</b>

**5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan Rp465.273.128.136,85**

Penerimaan Pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp465.273.128.137,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp465.273.128.136,85 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.47 Penerimaan Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
SiLPA Tahun Lalu	465.273.128.137,00	465.273.128.136,85	100,00	384.827.096.545,39
Pencairan dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>465.273.128.137,00</b>	<b>465.273.128.136,85</b>	<b>100,00</b>	<b>384.827.096.545,39</b>

**5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan Rp27.000.000.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Barito Utara merealisasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp27.000.000.000,00.

**5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA) Rp802.301.696.933,23**

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiLPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.48 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan	1.917.108.048.047,00	2.260.438.721.167,04	117,91	1.352.277.797.898,69
2	Belanja	2.029.907.824.098,00	166.102.458.458,02	82,08	1.110.086.436.746,00
3	Transfer	230.282.302.355,00	230.307.693.912,24	100,01	158.745.329.561,23
4	Surplus (Defisit: 1-(2+3))	(343.082.078.406,00)	364.003.874.996,38	(106,10)	328.309.165.427,06



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
5	Penerimaan Pembiayaan	465.273.128.137,00	465.273.128.136,85	100,00	384.827.096.545.39
6	Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000.00
7	Pembiayaan Netto : 5 – 6	438.273.128.137,00	438.273.128.136,85	100,00	381.827.096.545.39
	SiLPA (SiLPA) : 4+7	95.191.049.731,00	802.301.696.933,23	842,83	465.273.128.136,85

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp95.191.049.731,00 terealisasi Rp802.301.696.933,23 atau 842,83% mengalami kenaikan sebesar Rp337.028.568.796,38 atau sebesar 72,44% dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp465.273.128.136,85.

## 5.2. Penjelasan Akun–Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

### 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelum dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp802.301.696.933,23 Sedangkan tahun 2022 sebesar Rp465.273.128.136,85

### 5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Awal Tahun 2023 adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelum dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp802.301.696.933,23 berasal dari Nilai SAL per 31 desember 2023 setelah dikurang koreksi kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya TA 2023 tahun berjalan sebesar Rp0,00 dan Tahun Penggunaan Sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp465.273.128.136,85.

### 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.

Sisa lebih/kurang tahun 2023 sebesar Rp802.301.696.933,23 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp465.273.128.136,85 merupakan SiLPA pada LRA dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.49 Perhitungan SiLPA pada LRA**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan	2.260.438.721.167,04	1.352.277.797.898,69
2	Belanja	1.666.102.458.458,42	1.110.086.436.746,00
3	Transfer	230.307.693.912,24	158.745.329.561,23
4	Surplus(Defisit : 1-(2+3)	364.028.568.796,38	83.446.031.591,46



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5	Penerimaan Pembiayaan	465.273.128.136,85	384.827.096.545,39
6	Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000,00	3.000.000.000,00
7	Pembiayaan Netto : 5 – 6	438.273.128.136,85	381.827.096.545,39
	SILPA (SILPA) : 4+7	802.301.696.933,23	465.273.128.136,85

**5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kurang atas kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

**5.3. Neraca**

Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Utara terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset TA 2023 sebesar Rp5.760.236.428.394,76 Kewajiban sebesar Rp6.801.909.763,26,00 dan Ekuitas sebesar Rp5.753.434.518.631,50 Sedangkan Aset TA 2022 sebesar Rp3.790.115.860.044,15 Kewajiban sebesar Rp7.850.550.222,00 dan Ekuitas sebesar Rp3.782.265.309.822,51.

**5.3.1. Aset 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp5.753.135.515.712,50 Rp3.790.115.860.044,51**

**Tabel 5.50 Rincian Aset**  
**31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)	
			(%)	(Rp)
Aset Lancar	908.044.697.817,23	547.441.161.745,65	65,87	360.603.536.071,58
Investasi Jangka Panjang	133.986.234.431,61	104.824.869.289,00	27,82	29.161.365.142,61
Aset Tetap	3.467.642.764.544,92	2.887.891.035.698,86	20,08	579.751.728.846,06
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	1.250.562.731.601,00	249.958.793.311,00	400,31	1.000.603.938.290,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.760.236.428.394,76</b>	<b>3.790.115.860.044,51</b>	<b>51,98</b>	<b>1.970.120.568.350,25</b>

**5.3.1.1. Aset Lancar 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp908.044.697.817,23 Rp547.441.161.745,65**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan/dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp908.044.697.817,23 atau naik sebesar Rp360.603.536.071,58 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp547.441.161.745,65 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.51 Rincian Aset Lancar**  
**31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)	
			(%)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	753.744.508.570,23	418.558.385.141,85	80,08	335.186.123.428,38
Kas di Bendahara Penerimaan	15.288.400,00	0	0,00	0,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)	
			(%)	(Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	40.384.874.666,00	40.692.400.011,00	-0,76	-307.525.345,00
Kas Dana BOS	10.307.254,00	5.555.603,00	85,53	4.751.651,00
Kas di Dana Kapitasi pada FKTP	2.848.360.983,00	6.014.206.535,00	-52,64	-3.165.845.552,00
Kas Lainnya	5.298.357.060,00	7.973.449,00	66.350,00	5.290.383.611,00
Setara Kas	0,00	0	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	4.849.694.959,00	15.676.365.589,00	-69,06	-10.826.670.630,00
Piutang Retribusi Daerah	1.096.440.298,00	929.663.798,00	17,94	166.776.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	462.144.253,00	396.451.665,00	16,57	65.692.588,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.468.848.689,63	1.531.138.632,60	518,42	7.937.710.057,03
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	25.444.478.519,00	0,00	0,00	25.444.478.519,00
Piutang Transfer r Pemerintah Daerah Lainnya	-7.010.179.572,78	30.635.234.404,11	-122,88	-37.645.413.976,89
Piutang Lainnya	225.035.279,00	132.551.554,00	69,77	92.483.725,00
Penyisihan Piutang	0	-5.350.983.507,00	-100,00	5.350.983.507,00
Beban Dibayar Dimuka	0	260.126.567,00	-100,00	-260.126.567,00
Persediaan	71.206.538.459,15	37.952.092.303,09	87,62	33.254.446.156,06
<b>JUMLAH</b>	<b>908.044.697.817,23</b>	<b>547.441.161.745,65</b>	<b>65,87</b>	<b>360.603.536.071,58</b>

**5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp753.744.508.570,23 Rp418.558.385.141.85**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Terdapat selisih saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.005.237,00 Antara pencatatan Bank dan B.IX Kasda. dikarenakan ada SP2D Nomor 10980/SP2D-LS (BM) DPUPR/2023 Tanggal 27 Desember 2023 yang baru dicairkan di tahun 2024.

**Tabel 5.52 Kas di Kas Daerah**  
**31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)	
			(%)	(Rp)
Rekening Giro	753.744.508.570,23	418.558.385.141.85	80,08	335.186.123.428,38
- Kas di Kasda (PT. Bank Kalteng)	753.744.508.570,23	418.558.385.141.85	80,08	335.186.123.428,38
RKUD				
5000101001422/Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	747.429.123.247,23	363.888.264.843.85	105,40	383.540.858.403,38
DBH DR				
5000101000035/Rekening Khusus DR (DBH-DR)	6.315.385.323,00	54.670.120.298.00	(88,45)	(48.354.734.975,00)
<b>Jumlah</b>	<b>753.744.508.570,23</b>	<b>418.558.385.141.85</b>	<b>80,08</b>	<b>335.186.123.428,38</b>

Adapun rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

KETERANGAN		(Rp)
JUMLAH SALDO KAS DI KAS DAERAH		753.744.508.570,23
TERDIRI DARI :		
1	REKENING KHUSUS DANA REBOISASI	6.315.385.323,00
2	REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)	747.429.123.247,23
3	DEPOSITO	-
RINCIAN UNTUK POINT (2) KAS DI RKUD		747.429.123.247,23
TERDIRI DARI :		
1	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	26.650.500.173,54
2	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	5.509.780.819,00
3	SALDO DANA DANA PENYESUAIAN INFRA STRUKTUR DAERAH (DPID)	1.197.675.550,00
4	SALDO DANA PROYEK PEMDA DAN DESENTRALISASI (P2D2)	503.822.989,00
5	SALDO KALTENG BARIGAS	181.843.503,00
6	SALDO KALTENG HARATI	249.122.000,00
7	DANA INSENTIF DAERAH	6.111.475.735,00
8	BANTUAN KEUANGAN UMUM DARI PEMERINTAH PROVINSI	0,00
9	TRANSFER UMUM	707.024.902.477,69
JUMLAH DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (POINT 1 S.D. 8)		40.404.220.769,54

**5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp15.288,400,00 Rp0,00**

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.288.400,00 sedangkan Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

**5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp0,00 Rp0,00**

Saldo kas di tangan bendahara pengeluaran TA.2023 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp0,00.

**5.3.1.1.4. Kas di BLUD 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp40.384.874.666,00 Rp40.692.400.011.00**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo kas BLUD RSUD Muara Teweh per 31 Desember 2023 pada 1 rekening Bank atas nama BLUD RSUD Muara Teweh dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.53 Rekening BLUD RSUD Muara Teweh 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)	
			(%)	(Rp)
- BNI Cabang Muara Teweh Rek.0103282591	40.384.874.666,00	40.692.400.011.00	(0,76)	(307.525.345,00)
<b>Jumlah</b>	<b>40.384.874.666,00</b>	<b>40.692.400.011.00</b>	<b>(0,76)</b>	<b>(307.525.345,00)</b>

Saldo rekening 0103282591 pada Bank BNI adalah rekening bendahara penerimaan BLUD yang mengalami penurunan sebesar Rp307.525.345,00.- terdiri atas saldo Bank



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

BLUD sebesar Rp40.384.874.666,00.

**5.3.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP dan Kas Lainnya**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp8.146.718.043,00**      **Rp6.022.179.984,00**

Kas di bendahara FKTP dan Kas lainnya merupakan saldo kas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Kas Dana Prolanis Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.54 Kas di Bendahara FKTP dan Kas Lainnya**  
**31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)	
			(%)	(Rp)
Kas di Bendahara FKTP	2.848.360.983,00	6.014.206.535,00	(52,64)	(3.165.845.552,00)
Kas Lainnya	5.298.357.060,00	7.973.449,00	66.350,00	5.290.383.611,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.146.718.043,00</b>	<b>6.022.179.984,00</b>	<b>35,28</b>	<b>2.124.538.059,00</b>

Saldo Kas di Bendahara FKTP dan Kas lainnya per 31 Desember 2023 pada neraca sebesar Rp8.146.718.043,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.022.179.984,00 ada kenaikan sebesar Rp2.124.538.059,00. Saldo Kas di Bendahara FKTP TA 2023 sebesar Rp2.848.360.983,00 merupakan akumulasi saldo Dana Kapitasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.014.206.535,00. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah bahwa dana kapitasi tahun anggaran sebelumnya (dalam tahun anggaran 2022) dapat digunakan pada tahun berikutnya (dalam hal ini tahun anggaran 2023) sehingga saldo dana kapitasi berakumulasi tahun berikutnya. Adapun saldo dana kapitasi tahun anggaran 2023 rekapitulasi Jumlah transfer, belanja dan saldo masing- masing FKTP berdasar Rekening Koran Tahun Anggaran 2023 (*rekening koran terlampir*) dan SP3B masing-masing Puskesmas adalah sebagai berikut.

NO	Puskesmas	Saldo Awal 2023	Pendapatan Thn 2023	Belanja Thn 2023	Saldo Akhir 2023	No rek BPD Kalteng
1	BATU RAYA	204.463.560	-	89.692.066	114.771.494	5.000.102.000.638
2	SIKUI	465.525.958	-	288.271.404	177.254.554	5.000.102.000.631
3	LAHEI II	331.695.109	-	169.277.681	162.417.428	5.000.102.000.630
4	LAHEI I	237.296.491	-	159.661.694	77.634.797	5.000.102.000.628
5	BENAO	301.478.827	-	191.753.595	109.725.232	5.000.102.000.633
6	MUARA TEWEH	1.206.049.305	-	601.758.489	604.290.816	5.000.102.000.612
7	LANJAS	1.175.074.607	-	593.554.384	581.520.223	5.000.102.000.614
8	SEI RAHAYU	104.844.614	-	71.958.022	32.886.592	5.000.102.000.636
9	LEMO	96.443.510	45.382.967	141.799.799	26.678	5.000.102.000.608
10	PIR BUTONG	438.004.426	-	269.844.402	168.160.024	5.000.102.000.610
11	TRAHEAN	943.765	114.993.437	111.525.337	4.411.865	5.000.102.002.906
12	BENANGIN	142.838.747	-	113.696.222	29.142.525	5.000.102.000.642
13	MAMPUAK	62.670.073	-	47.652.277	15.017.796	5.000.102.000.640



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	Puskesmas	Saldo Awal 2023	Pendapatan Thn 2023	Belanja Thn 2023	Saldo Akhir 2023	No rek BPD Kalteng
14	TUMPUNG LAUNG	755.790.146	-	160.620.291	595.169.855	5.000.102.000.615
15	KETAPANG	188.543.925	-	64.681.513	123.862.412	5.000.102.000.618
16	KANDUI	189.101.503	-	148.732.003	40.369.500	5.000.102.000.620
17	LAMPEONG	113.509.645	-	101.810.453	11.699.192	5.000.102.000.643
<b>TOTAL</b>		<b>6.014.274.211</b>	<b>160.376.404</b>	<b>3.326.289.632</b>	<b>2.848.360.983</b>	

Saldo Kas lainnya per 31 Desember 2023 merupakan akumulasi saldo BOK dan saldo Prolanis di Puskesmas. Adapun saldo akhir BOK puskesmas adalah sebesar Rp5.294.458.405,00 Sedangkan saldo Prolanis puskesmas sebesar Rp3.898.655,00 merupakan akumulasi saldo kas dari 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023.

Berikut ini perbandingan posisi Kas BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

NO	UNIT KERJA PUSKESMAS	SALDO AWAL 2023 (Rp)	PENDAPATAN 2023 (Rp)	BELANJA 2023 (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
1	MUARA TEWEH	-	742.000.000	358.454.880	383.545.120
2	LANJAS	-	919.330.000	546.281.609	373.048.391
3	LEMO	-	583.975.000	353.298.061	230.676.939
4	SEI RAHAYU	-	605.360.000	221.410.000	383.950.000
5	BUTONG	-	641.942.000	518.404.930	123.537.070
6	SIKUI	-	896.000.000	593.122.665	302.877.335
7	LAHEI I	-	972.135.000	554.144.612	417.990.388
8	LAHEI II	-	995.000.000	731.428.415	263.571.585
9	BENAO	-	1.129.800.000	892.596.302	237.203.698
10	KANDUI	-	922.000.000	655.889.206	266.110.794
11	KETAPANG	-	560.980.000	168.138.750	392.841.250
12	TUMPUNG LAUNG	-	1.120.000.000	657.346.569	462.653.431
13	MAMPUAK	-	808.444.000	551.114.526	257.329.474
14	BENANGIN	-	918.500.000	508.427.096	410.072.904
15	LAMPEONG	-	935.797.000	557.365.270	378.431.730
16	BATU RAYA	-	811.450.000	465.791.647	345.658.353
17	TRAHEAN	-	763.850.000	698.890.057	64.959.943
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>14.326.563.000</b>	<b>9.032.786.673</b>	<b>5.294.458.405</b>

Berikut ini perbandingan posisi Kas Prolanis per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	PUSKESMAS	SALDO AWAL 2023	PENDAPATAN 2023	BELANJA TAHUN 2023	ADMIN BANK	SISA SALDO TAHUN 2023
1	Sikui	-	10.124.000	10.124.000	-	-
2	Lahei 2	6.139.250	20.949.500	27.021.500	-	67.250
3	Muara Teweh	54.190	7.623.200	5.416.000	-	2.261.390
4	Kandui	63.687	1.230.100	1.273.600	-	20.187
5	Sei Rahayu	38.593	-	-	38.593	-
6	Lanjas	35.524	-	-	33.000	2.524
7	Lemo	1.602.254	-	-	66.000	1.536.254
8	Lahei I	39.950	7.637.100	7.600.000	66.000	11.050
<b>TOTAL</b>		<b>7.973.448</b>	<b>47.563.900</b>	<b>51.435.100</b>	<b>203.593</b>	<b>3.898.655</b>

**5.3.1.1.6. Kas Dana Bos**

**31 Desember 2023**

**Rp10.307.254,00**

**31 Desember 2022**

**Rp5.555.603,00**

Kas Dana BOS merupakan saldo kas Dana BOS Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.55 Kas Dana Bos**  
**31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)	
			(%)	(Rp)
Kas Dana BOS	10.307.254,00	5.555.603,00	85,53	4.751.651,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.307.254,00</b>	<b>5.555.603,00</b>	<b>85,53</b>	<b>4.751.651,00</b>

Saldo Dana Bos Per 31 Desember 2022 sebesar Rp163.000,00 dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) PPh pasal 21 sebesar Rp5.392.603,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp10.307.254,00

Jumlah Pendapatan Dana BOS untuk Kabupaten Barito utara TA 2023 sebesar Rp20.838.820.000,00 penerimaan dari BOS Reguler sebesar Rp19.330.320.000,00 terdiri dari Pendapatan Dana BOS SD sebesar Rp12.442.684.000,00 dan SMP sebesar Rp6.887.636.000,00. Pendapatan dari Dana BOS Kinerja sebesar Rp1.507.500.000,00 terdiri dari Pendapatan Dana BOS Kinerja SD sebesar Rp1.002.500.000,00 dan SMP sebesar Rp505.000.000,00

Saldo Kas di bendahara dana BOS pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar Rp5.555.603,00 kenaikan ini disebabkan realisasi belanja BOS pada tahun 2023 maksimal dalam pemanfaatan dana dimaksud.

Jumlah Belanja Dana BOS untuk kabupaten Barito utara TA 2023 sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Rp20.837.194.746,00 Belanja dari BOS Reguler sebesar Rp19.399.814.837,00 terdiri dari Belanja Dana BOS SD sebesar Rp12.508.706.837,00 dan SMP sebesar Rp6.891.108.000,00. Belanja dari Dana BOS Kinerja sebesar Rp1.507.500.000,00 terdiri dari Belanja Dana BOS Kinerja SD sebesar Rp816.249.465,00 dan SMP sebesar Rp223.750.535,00.

**5.3.1.1.7. Piutang Pendapatan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp41.321.606.718,63** **Rp49.168.854.088,61**

Piutang pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Barito Utara terhadap penerimaan kas baik yang berasal dari pendapatan pajak. Pendapatan retribusi dan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah keluar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah). Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan SK Gubernur untuk Bagi Hasil. Rincian disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.56 Piutang Pendapatan**  
**31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Piutang Pajak Daerah	4.849.694.959,00	15.676.365.589,00	(10.826.670.630,00)
Piutang Retribusi Daerah	1.096.440.298,00	929.663.798,00	166.776.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	462.144.253,00	396.451.665,00	65.692.588,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.468.848.689,63	1.531.138.632,00	7.937.710.057,13
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Pemerintah Daerah Lainnya	25.444.478.519,00	30.635.234.404,11	(5.190.755.885,11)
<b>Jumlah</b>	<b>41.321.606.718,63</b>	<b>49.168.854.088,61</b>	<b>-7.847.247.369,98</b>

Piutang Pajak Daerah adalah tagihan pajak daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

- Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp4.849.694.959,00 sedangkan TA 2022 Sebesar Rp15.676.365.589,00 berada pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah merupakan tagihan atas Mutasi Piutang PBB P2 sampai dengan 31 Desember 2022;
- Pengurangan piutang PBB-P2 Tahun 2023 sebesar Rp.6.660.011.251,00 dari Piutang Pajak Daerah s.d Tahun 2023 sebesar Rp.11.509.706.210,00 dikarenakan adanya reklasifikasi Piutang PBB-P2 yang sudah Kadaluarsa ke Aset Lain-Lain dengan penjelasan sebagai berikut.

No.	Tahun	Piutang PBB-P2 (Pokok Pajak) per 31 Desember 2023	Piutang PBB-P2 Kategori Kadaluarsa	Sisa Piutang PBB-P2 (Pokok Pajak) per 31 Desember 2023
1	1995	1.165.614,00	1.165.614,00	0,00
2	1996	13.992.211,00	13.992.211,00	0,00
3	1997	11.352.080,00	11.352.080,00	0,00
4	1998	18.921.852,00	18.921.852,00	0,00
5	1999	20.506.248,00	20.506.248,00	0,00
6	2000	46.697.439,00	46.697.439,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Tahun	Piutang PBB-P2 (Pokok Pajak) per 31 Desember 2023	Piutang PBB-P2 Kategori Kadaluarsa	Sisa Piutang PBB-P2 (Pokok Pajak) per 31 Desember 2023
7	2001	67.632.464,00	67.632.464,00	0,00
8	2002	109.814.045,00	109.814.045,00	0,00
9	2003	154.553.319,00	154.553.319,00	0,00
10	2004	59.857.525,00	59.857.525,00	0,00
11	2005	90.728.039,00	90.728.039,00	0,00
12	2006	94.843.341,00	94.843.341,00	0,00
13	2007	68.133.037,00	68.133.037,00	0,00
14	2008	163.921.006,00	163.921.006,00	0,00
15	2009	313.713.218,00	313.713.218,00	0,00
16	2010	590.481.191,00	590.481.191,00	0,00
17	2011	584.489.615,00	584.489.615,00	0,00
18	2012	663.872.130,00	663.872.130,00	0,00
19	2013	1.029.274.727,00	1.029.274.727,00	0,00
20	2014	625.927.845,00	625.927.845,00	0,00
21	2015	604.792.920,00	604.792.920,00	0,00
22	2016	621.378.150,00	621.378.150,00	0,00
23	2017	703.963.235,00	703.963.235,00	0,00
24	2018	593.178.520,00	0,00	593.178.520,00
25	2019	733.393.213,00	0,00	733.393.213,00
26	2020	762.172.091,00	0,00	762.172.091,00
27	2021	863.379.747,00	0,00	863.379.747,00
28	2022	894.483.873,00	0,00	894.483.873,00
29	2023	1.003.087.515,00	0,00	1.003.087.515,00
<b>Total</b>		<b>11.509.706.210,00</b>	<b>6.660.011.251,00</b>	4.849.694.959,00

- c. Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.096.440.298,00 adalah Piutang Retribusi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.029.127.569,00 dan Piutang Retribusi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp67.312.729,00 Adapun Rincian Piutang Retribusi dapat dirinci sebagai berikut.

**1. Piutang Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rincian Piutang Retribusi Disperindag pasar**

**Pasar Pendopo**

Sisa Piutang Tahun 2013	Rp	9.685.000,00
Sisa Piutang Tahun 2014	Rp	25.419.000,00
Sisa Piutang Tahun 2015	Rp	24.879.000,00
Sisa Piutang Tahun 2015	Rp	48.548.000,00
Sisa Piutang Tahun 2018	Rp	74.595.561,00
Sisa Piutang Tahun 2019	Rp	0,00
Sisa Piutang Tahun 2020	Rp	141.183.508,00
Sisa Piutang Tahun 2021	Rp	0,00
Sisa Piutang Tahun 2022	Rp	7.532.000,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Sisa Piutang Tahun 2023 Rp 77.172.500,00

Total sisa Piutang Pasar Pendopo Thn 2013 s/d 2023 Rp 409.014.569,00

**Pasar Barito Permai**

Sisa Piutang Tahun 2013 Rp 8.320.000,00

Sisa Piutang Tahun 2014 Rp 23.370.000,00

Sisa Piutang Tahun 2015 Rp 28.920.000,00

Sisa Piutang Tahun 2016 Rp 21.170.000,00

Sisa Piutang Tahun 2017 Rp 33.090.000,00

Sisa Piutang Tahun 2018 Rp 16.780.000,00

Sisa Piutang Tahun 2019 Rp 4.850.000,00

Sisa Piutang Tahun 2020 Rp 23.802.000,00

Sisa Piutang Tahun 2021 Rp 2.470.000,00

Sisa Piutang Tahun 2022 Rp 21.490.000,00

Sisa Piutang Tahun 2023 Rp 92.980.000,00

Total sisa Piutang Pasar Barito Permai Thn 2013 s/d 2023 Rp 277.242.000,00

**Pasar Bebas Banjir**

Sisa Piutang Tahun 2013 Rp 1.870.000,00

Sisa Piutang Tahun 2014 Rp 5.265.000,00

Sisa Piutang Tahun 2015 Rp 6.156.000,00

Sisa Piutang Tahun 2016 Rp 0,00

Sisa Piutang Tahun 2017 Rp 23.244.000,00

Sisa Piutang Tahun 2018 Rp 17.180.000,00

Sisa Piutang Tahun 2019 Rp 12.311.000,00

Sisa Piutang Tahun 2020 Rp 16.841.000,00

Sisa Piutang Tahun 2021 Rp 9.768.000,00

Sisa Piutang Tahun 2022 Rp 7.174.000,00

Sisa Piutang Tahun 2023 Rp 41.929.000,00

Total sisa Piutang Pasar Bebas Banjir Thn 2013-2023 Rp 141.718.000,00

**Pasar Dermaga**

Sisa Piutang Tahun 2013 Rp 3.030.000,00

Sisa Piutang Tahun 2014 Rp 11.844.000,00

Sisa Piutang Tahun 2015 Rp 18.684.000,00

Sisa Piutang Tahun 2016 Rp 11.609.000,00

Sisa Piutang Tahun 2017 Rp 18.548.000,00

Sisa Piutang Tahun 2018 Rp 2.995.000,00

Sisa Piutang Tahun 2019 Rp 0,00

Sisa Piutang Tahun 2020 Rp 9.980.000,00

Sisa Piutang Tahun 2021 Rp 25.881.000,00

Sisa Piutang Tahun 2022 Rp 30.940.000,00

Sisa Piutang Tahun 2023 Rp 30.312.000,00

Total sisa Piutang Pasar Dermaga Tahun 2013 s/d 2023 Rp 163.823.000,00

**Pasar Gembira**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Sisa Piutang Tahun 2020	Rp	4.690.000.00
Sisa Piutang Tahun 2021	Rp	8.180.000.00
Sisa Piutang Tahun 2022	Rp	10.850.000.00
Sisa Piutang Tahun 2023	Rp	13.610.000.00
Total Sisa Piutang Pasar Gembira Thn 2020 s/d 2023	<u>Rp</u>	<u>37.330.000.00</u>

Total Piutang Disperindag sampai dengan 31 Desember 2023 **Rp1.029.346.000,00**

**2. Piutang Retribusi Dinas Komunikasi Dan Informatika**

Rincian Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

No	URAIAN	PEMILIK MENARA	JUMLAH (Rp)
1	Piutang Yang Masih Belum Terbayar (kepemilikan Menara sudah berpindah tangan)	PT. Triview Geospatial Mandiri (TGM)	3.539.104.00
2	Piutang Yang Masih Belum Terbayar	PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel)	0.00
3	Piutang Yang Masih Belum Terbayar	PT. XL Axiata Tbk	16.130.245.00
4	Piutang Yang Masih Belum Terbayar	PT. Tower Bersama Grub (TBG)	14.583.140.00
5	Piutang Yang Masih Belum Terbayar	PT. Indosat.Tbk	25.043.0700.00
6	Piutang Yang Masih Belum Terbayar	PT. Protelindo dan PT. STP	6.017.450.00
7	Piutang Yang Masih Belum Terbayar	PT. Telkomsel. Tbk	1.999.720.00
8	Kelebihan Bayar	PT. Protelindo	-1.446.103.00
	<b>Jumlah</b>		<b>67.312.729.00</b>

- d. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah tagihan atas bagi hasil laba Perusda Batara Membangun untuk Tahun Buku 2023 sesuai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs.Abror Nomor.00003/2.0474/AU.2/05/0762-5/1/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebesar 30% dari Laba Rugi Tahun Berjalan yang akan disetorkan ke kasda setelah ada SK penetapan dari Bupati Barito Utara adalah sebesar Rp462.144.253,00.
- e. Untuk Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada Tahun 2023 sebesar Rp9.468.848.689,63 yang berasal berasal dari Denda Keterlambatan Pekerjaan pada Dinas PUPR yang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.282.737.111,63 belum diterima dalam rekening Kas Daerah. Dan berasal Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp4.866.466.839,00 serta Piutang BLUD RSUD Muara Teweh sebesar Rp3.319.644.739,00 yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

1. Dinas PUPR

No	URAIAN	JUMLAH DENDA (Rp)
1	PT. TIRTA DHEA ADDONIC PRATAMA Pst.Jakarta Denda Keterlambat atas Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Negara Km. 52 -Trans. 55 (Multi years)	385.000.000,00
2	PT. BEBE TRI JAYA BARUTAMA Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kandui - Tongka (Multi years) Tahun 2014-2017	454.751.000,00
3	CV. FADILAH PRIMA PERSADA Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Trinsing-PIR Butong	110.153.983,56
4	CV. FADILAH PRIMA PERSADA Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kandui- ketapang	71.067.817,48
5	CV. FADILAH PRIMA PERSADA Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kandui- ketapang	202.949.166,22
6	CV. FADILAH PRIMA PERSADA Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Trinsing- PIR Butong-	58.815.144,37
	<b>Jumlah</b>	<b>1.282.737.111,63</b>

2. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah (BPKA)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.866.466.839,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.866.466.839,00</b>

3. Piutang BLUD RSUD

a) Piutang Usaha

No	Uraian Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	PT. Jasa Boga Indonesia	17.105.000,00
2	PT. Sumber Multi Rejeki	3.568.000,00
3	Meindo Elang Indah	571.000,00
4	PT. Asuransi Umum Mega Health	2.745.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.989.500,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

b) Piutang Klaim BPJS Kesehatan

No	Uraian Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	BPJS Bulan Desember 2023	2.046.285.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.046.285.800,00</b>

c) Piutang Klaim BPJS Ketenagakerjaan

No	Uraian Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	BUPEL AGUSTUS –SEPTEMBER 2023	244.532.989,00
	<b>Jumlah</b>	<b>244.532.989,00</b>

d) Piutang Klaim Covid-19

No	Uraian Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	BUPEL COVID-19	114.593.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>114.593.000,00</b>

e) Piutang Klaim SKTM

No	Uraian Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
	BUPEL SKTM	
	SEPTEMBER 2023	282.422.250,00
	OKTOBER 2023	244.715.950,00
	NOVEMBER 2023	248.926.750,00
	DESEMBER 2023	114.178.500,00
	Jumlah	890.243.450,00
	<b>TOTAL PIUTANG (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.319.644.739,00</b>

f. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2023 sebesar Rp25.444.478.519,00 merupakan Piutang atas Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III dan Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Se Kalimantan Tengah Triwulan IV TA 2023 sesuai SK Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/115/2024 tanggal 22 April 2023 dan SK Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/75/2022 tanggal 11 Maret 2023 dan pada Tahun 2023 piutang tersebut sudah dibayar.

5.3.1.1.8.	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>Rp0,00</b>	<b>Rp132.551.554,00</b>

Piutang lainnya merupakan nilai dari Tagihan Lancar TP-TGR pada SKPD.

**Piutang BLUD RSUD**

No	Uraian Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	Piutang TP-TGR berdasarkan SKTM an CITRA DIANA Tahun 2023	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

<b>5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp(7.010.179.572,78)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp(5.350.983.507,00)</b>
--------------------------------------	--	--

Penyisihan Piutang atas tagihan macet tidak lancar dan meragukan Retribusi pasar tahun 2023 pada Disdagrin sedangkan penyisihan piutang untuk tagihan atas piutang pajak PBB P2 pada BPPD, Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada DPUPR dan Piutang Usaha dan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Muara Teweh.

<b>5.3.1.1.10. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp225.035.279,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp260.126.567,00</b>
---	--	--

Beban dibayar dimuka tahun 2022 sebesar Rp260.126.567,00 –sedangkan tahun 2023 sebesar Rp225.035.279,00 merupakan beban atas pemeliharaan kendaraan bermotor khususnya Pajak Kendaraan Bermotor baik Roda2 maupun Roda4 pada seluruh Perangkat Daerah selama TA 2022.sewa Gedung Puskesmas Pada Dinas Kesehatan serta Beban dibayar dimuka pengadaan pengisian Tabung Oksigen pada BLUD RSUD Muara Teweh pada Tahun 2022.

<b>5.3.1.1.11. Persediaan</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp71.206.538.459,15</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp37.952.092.302,73</b>
-------------------------------	---	---

Saldo persediaan sebesar Rp71.206.538.459,15 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2023 berdasarkan hasil *stock opname* atau hasil inventarisasi fisik dan menggunakan nilai perolehan terakhir. Persediaan per 31 Desember 2023 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.57 Persediaan**  
**31 Desember 2023**

No	PERANGKAT DAERAH	MUTASI PERSEDIAAN TAHUN 2023			
		SALDO AWAL	Masuk	Keluar	SALDO AKHIR
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (BKPSDM)	0,00	694.185.414,00	694.185.414,00	0,00
2	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BPPD)	0,00	563.592.105,00	563.592.105,00	0,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)	1.021.329.960,00	2.963.935.898,00	3.678.589.558,00	306.676.300,00
4	KECAMATAN LAHEI	0,00	184.306.875,00	184.306.875,00	0,00
5	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISPARPORA)	0,00	2.668.353.541,00	2.668.353.541,00	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)	3.300.000,00	722.971.144,00	721.012.644,00	5.258.500,00
7	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR (DISDAGRIN)	0,00	1.060.772.655,00	1.060.772.655,00	0,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN	76.735.000,00	4.056.139.330,00	4.047.829.330,00	85.045.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	PERANGKAT DAERAH	MUTASI PERSEDIAAN TAHUN 2023			
		SALDO AWAL	Masuk	Keluar	SALDO AKHIR
	PERIKANAN (DKPP)				
9	KECAMATAN TEWEH TENGAH	0,00	1.113.131.873,00	1.113.131.873,00	0,00
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KEBANGPOL)	0,00	589.646.875,00	589.646.875,00	0,00
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN (PRKPP)	0,00	2.790.397.292,00	2.790.397.292,00	0,00
12	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	0,00	1.815.977.177,00	1.815.977.177,00	0,00
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (DISIPTAKA)	0,00	312.608.709,00	312.608.709,00	0,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)	0,00	510.793.240,00	510.793.240,00	0,00
15	KECAMATAN MONTALLAT	0,00	404.486.363,00	404.486.363,00	0,00
16	KECAMATAN TEWEH SELATAN	0,00	205.172.050,00	205.172.050,00	0,00
17	RSUD	4.046.246.707,00	18.611.683.976,00	17.482.943.605,07	5.174.987.077,93
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET (BPKA)	1.827.500,00	830.051.919,00	830.071.419,00	1.808.000,00
19	SEKRETARIAT DPRD (SET DPRD)	0,00	1.694.080.361,90	1.694.080.361,90	0,00
20	DINAS PERTANIAN	218.530.023,00	28.002.340.968,00	27.306.174.323,00	914.696.668,00
21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN (DISKIP)	0,00	688.148.113,00	688.148.113,00	0,00
22	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	0,00	271.934.000,00	271.934.000,00	0,00
23	INSPEKTORAT	4.270.000,00	695.332.144,00	698.477.144,00	1.125.000,00
24	DISDAMKARMAT	-	978.619.927,00	978.619.927,00	0,00
25	SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)	0,00	7.382.931.443,00	7.373.621.443,00	9.310.000,00
26	DISDALDUK KBP3A	84.572.198,00	1.613.898.265,98	1.514.081.142,98	184.389.321,00
27	BAPPEDALITBANG	4.907.500,00	563.637.900,00	562.018.900,00	6.526.500,00
28	KECAMATAN TEWEH TIMUR	0,00	122.880.750,00	122.880.750,00	0,00
29	DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)	2.650.000,00	17.937.977.163,00	17.940.627.163,00	0,00
30	KECAMATAN TEWEH BARU	0,00	414.291.600,00	414.291.600,00	0,00
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.265.774.670,00	1.503.233.491,00	2.769.008.161,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	PERANGKAT DAERAH	MUTASI PERSEDIAAN TAHUN 2023			
		SALDO AWAL	Masuk	Keluar	SALDO AKHIR
	(BPBD)				
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	458.361.134,00	458.361.134,00	0,00
33	KECAMATAN LAHEI BARAT	0,00	557.256.750,00	557.256.750,00	0,00
34	DINSOSPMD	136.532.500,00	750.662.225,00	794.845.925,00	92.348.800,00
35	KECAMATAN GUNUNG PUREI	0,00	220.338.650,00	220.338.650,00	0,00
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	0,00	355.041.082,00	355.041.082,00	0,00
37	DINAS KESEHATAN	14.563.136.761,64	20.101.256.526,44	23.516.514.027,80	11.147.879.260,28
38	DINAS PU PR	16.522.279.554,09	38.875.512.201,03	2.121.303.723,18	53.276.488.031,94
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.952.092.373,73</b>	<b>163.285.941.131,36</b>	<b>130.031.495.045,93</b>	<b>71.206.538.459,15</b>

**TOTAL URAIAN OBYEK PERSEDIAAN SKPD SE-KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TA 2023**

NO	AKUN NERACA	NILAI PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2023			SALDO AKHIR 31/12/2023
		SALDO AWAL 1/01/2023	MASUK	KELUAR	
			BELANJA	PENGUNAAN	
1	Belanja Hibah Barang kepada Lembaga Dibentuk Berdasarkan Peraturan	0,00	16.479.959.514,00	16.479.959.514,00	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	1.061.620.850,00	1.061.620.850,00	0,00
3	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.175.372.408,67	256.180.606,00	477.594.172,00	1.953.958.842,67
4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.478.070,00	6.632.646.015,57	6.652.174.261,00	6.949.824,93
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	1.661.548.860,00	1.661.548.860,00	0,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	497.025.960,00	511.004.750,00	677.009.410,00	331.021.300,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	41.475.150,00	55.239.828,00	96.714.978,00	0,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	95.903.200,00	3.668.979.375,00	3.471.999.175,00	292.883.400,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	167.853.650,00	4.133.549.893,33	4.089.651.043,33	211.752.500,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	586.807.484,00	586.807.484,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	7.350.420,00	7.350.420,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	13.191.000,00	13.191.000,00	0,00
14	Belanja Alat/Bahan - Alat Tulis Kantor	1.065.600,00	465.183.864,00	466.249.464,00	0,00
15	Belanja Alat/Bahan - Kertas dan Cover	198.396.161,00	5.645.669.131,00	5.766.502.892,00	77.562.400,00







**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)	Naik/(Turun) (Rp)
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	133.986.234.431,61	104.824.869.289,00	27,82	29.161.365.142,61
<b>Jumlah</b>	<b>133.986.234.431,61</b>	<b>104.824.869.289,00</b>	<b>27,82</b>	<b>29.161.365.142,61</b>

**5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**0,00 Rp0,00**

Saldo Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

**5.3.1.2.2. Investasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Permanen Rp133.986.234.431,61 Rp104.824.869.289,00**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)	
			(%)	(Rp)
Investasi Permanen	133.986.234.431,61	104.824.869.289,00	27,82	29.161.365.142,61
<b>Jumlah</b>	<b>133.986.234.431,61</b>	<b>104.824.869.289,00</b>	<b>27,82</b>	<b>29.161.365.142,61</b>

Untuk penambahan dan pengurangan Investasi Permanen Pemda Kabupaten Barito Utara per Perusahaan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
1	PT. Bank Pembangunan Kalteng	46.000.000.000,00	28.902.096.263,61	0,00	74.902.096.263,61
2	PDAM Kabupaten Barito Utara	36.825.010.047,00	0,00	1.309.588.183,00	35.515.421.864,00
3	PT. JAMKRIDA Kalteng	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
4	Perusda Batara Membangun	18.999.859.242,00	1.568.857.062,00	0,00	20.568.716.304,00
	<b>Jumlah</b>	<b>104.824.869.289,00</b>	<b>30.470.953.325,61</b>	<b>1.309.588.183,00</b>	<b>133.986.234.431,61</b>

Rincian Investasi Permanen Pemda Kabupaten Barito Utara per Perusahaan selama Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut (dalam rupiah):

**Bank Pembangunan Kalteng (*cost method*)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
- Saldo awal	46.000.000.000,00	43.000.000.000,00
- Penambahan tahun berjalan	28.902.096.263,61	3.000.000.000,00
- Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	74.902.096.263,61	46.000.000.000,00

**PDAM Kabupaten Barito Utara (*equity method*)**

- Penyesuaian PMP dari Akumulasi Laba/Rugi PDAM		
- Saldo Awal PMP	39.872.136.783,00	39.872.136.783,00
- Akumulasi saldo laba/rugi tahun lalu	(71.010.061.042,00)	(65.075.372.540,00)
- Laba/Rugi tahun berjalan TA 2022		(5.635.282.859,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	(4.999.313.229.00)	
- Koreksi Penyertaan Pemerintah Pusat	72.936.999.783.00	72.936.999.783.00
- Modal Hibah	25.247.753.00	25.247.753.00
- Laba/Rugi tahun berjalan TA 2023	<u>(2.279.796.403.000)</u>	<u>(4.999.313.229.00)</u>
- Akumulasi Saldo Laba/rugi akhir Tahun berjalan	(75.039.166.053.00)	(71.010.061.042,00)
- Koreksi dan Reklasifikasi TA 2023 Nilai penyertaan modal di PDAM	970.208.219.00	(299.405.644,00)
- Nilai Penyertaan modal di PDAM Kab. Barito Utara	35.515.421.864.00	36.825.010.047.00

Perhitungan ini berdasarkan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Mohammd Sunusi & Rekan Nomor.00035/2.1392/AU.2/11/1878-I/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2022 dengan Opini Wajar

**PT.JAM KRIDA KALTENG (*cost method*)**

- Saldo awal	3.000.000.000.00	3.000.000.000.00
- Penambahan tahun berjalan	- 0.00	0.00
- Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	3.000.000.000.00	3.000.000.000.00

**PERUSDA BATARA MEMBANGUN**  
**(*equity method*)**

- SaldoAwal	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00
- Penyesuaian PMP dari Akumulasi laba/rugi pembagian dividen Laba/Rugi:		
Tahun 2014	987.937.884,00	
Tahun 2015	2.156.735.362,00	
Tahun 2016	2.528.866.235,00	
Tahun 2017	1.304.771.044,00	
Tahun 2018	1.658.383.191,00	
Tahun 2019	1.524.526.838,00	
Tahun 2020	1.837.336.439,00	
Tahun 2021	2.719.330.175,00	
Tahun 2022	2.884.672.968,00	
Tahun 2023	3.080.961.685,00	
Dividen ke Pemkab Barito Utara		
Tahun 2014	(296.381.365.00)	
Tahun 2015	(643.338.149.00)	
Tahun 2016	(758.659.870.00)	
Tahun 2017	(391.431.313.00)	
Tahun 2018	(497.514.957.30)	
Tahun 2019	(457.358.051.40)	
Tahun 2020	(551.200.931.70)	
Tahun 2021	(815.799.052.50)	
Tahun 2022	(865.401.890.40)	
Tahun 2023	(462.144.253,00)	

Perhitungan Investasi PMP Kab. Barut

-Saldo awal Tahun 2022	18.999.859.242,00	17.486.142.544,00
- Saldo TA. 2022 setelah Koreksi	0.00	0.00
- Pembagian Laba Tahun Lalu	0.00	0.00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Pengurangan**

- Dana Pembangunan Daerah	0.00	0.00
- Sosial dan Pendidikan	0.00	0.00
- Jasa Produksi	0.00	0.00
- L/R Tahun berjalan	0.00	0.00
- Pengurangan Tahun Berjalan	(1.521.905.521,00)	(1.370.956.270,00)

**Penambahan**

- Penambahan Tahun Berjalan	3.080.961.685,00	2.884.672.968,00
- Saldo Investasi Penyertaan Modal Akhir	20.568.716.304,00	18.999.859.242,00

Perhitungan ini berdasarkan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Drs.ABROR Nomor.00003/2.0474/AU.2/05/0762-5/1/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan opini Wajar.

**5.3.1.3. Aset Tetap** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp3.467.642.764.544,92** **Rp2.887.891.035.698,86**

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.467.642.764.544,92 mengalami kenaikan sebesar Rp579.751.728.846,06 atau 20,08% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

**Tabel 5.59 Aset Tetap**  
**31 Desember 2023**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Tanah	706.205.232.123,40	581.954.985.193,40	124.250.246.930,00
2	Peralatan dan Mesin	731.064.330.734,46	640.623.409.404,33	90.440.921.330,13
3	Gedung dan Bangunan	1.398.628.860.651,81	1.043.438.430.702,81	355.190.429.949,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.106.316.051.027,72	1.909.838.267.835,79	196.477.783.191,93
5	Aset Tetap Lainnya	11.593.525.044,10	11.300.422.364,10	293.102.680,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	369.123.048.143,97	380.791.286.616,97	-11.668.238.473,00
7	Akumulasi Penyusutan	-1.855.288.283.180,54	(1.680.055.766.41854)	-175.232.516.762,00
	<b>Jumlah Nilai Buku</b>	<b>3.467.642.764.544,92</b>	<b>2.887.891.035.698,86</b>	<b>579.751.728.846,06</b>

Rincian mutasi masing-masing Aset Tetap Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Saldo 01-01-2023	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31-12-2023
		Tambah	Kurang	
1	581.954.985.193,40	124.564.979.430,00	314.732.500,00	706.205.232.123,40
2	640.623.409.404,33	114.995.386.298,13	24.554.464.968,00	731.064.330.734,46
3	1.043.438.430.702,81	657.746.153.095,64	302.555.723.146,64	1.398.628.860.651,81



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

4	1.909.838.267.835,79	362.043.329.900,93	165.565.546.709,00	2.106.316.051.027,72
5	11.300.422.364,10	2.616.121.879,00	2.323.019.199,00	11.593.525.044,10
6	380.791.286.616,97	211.891.372.627,00	223.559.611.100,00	369.123.048.143,97
	4.567.946.802.117,40	1.473.857.343.230,70	718.873.097.622,64	5.322.931.047.725,46
1)Tanah.2) Peralatan dan Mesin 3) Gedung danBangunan 4) Jalan Irigasi dan Jaringan 5) Aset Tetap Lainnya 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan				

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 Rp5.322.931.047.725,46 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.567.946.802.117,40 terjadi kenaikan sebesar Rp754.984.245.608,06 atau 16,53%. Penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut.

**5.3.1.3.1. Tanah** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp706.205.232.123,40** **Rp581.954.985.193,40**

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp706.205.232.123,40 mengalami kenaikan sebesar Rp124.250.246.930,00 atau 21,35% dibandingkan dengan saldo Tahun sebelumnya.

**Tabel 5.60 Aset Tetap Tanah**  
**31 Desember 2023**

No	Saldo 01-01-2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo 31-12-2023	Naik/(Turun)
		Penambahan	Pengurangan		
1	581.954.985.193,40	124.564.979.430,00	314.732.500,00	706.205.232.123,40	124.250.246.930,00

1	Tanah	<i>(dalam Rupiah)</i>
	a. Mutasi Tambah	<b><u>124.564.979.430,00</u></b>
	Belanja Modal Tahun 2023;	
	- Dinas PRKPP	1.144.455.040,00
	- Dinas Budparpora Hibah;	788.740.000,00
	- Sekretariat Daerah Reklasifikasi;	121.480.586.000,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dari KIB-D	241.530.390,00
	- Dinas PRKPP dari KIB-C	909.668.000,00
	b. Mutasi Kurang	<b><u>314.732.500,00</u></b>
	Reklasifikasi	
	- Dinas PRKPP reklas ke KDP	263.375.000,00
	- Dinas Parpora reklas ke KDP	46.357.500,00
	- Dinas Parpora reklas ke Barang Pakai Habis	5.000.000,00

**5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp731.064.330.734,46** **Rp640.623.409.404,33**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp731.064.330.734,46 mengalami kenaikan sebesar Rp90.440.921.330,13 atau 14,11% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 5.61 Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**31 Desember 2023**

No.	Saldo 01-01-2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo 31-12-2023	Naik/(Turun)
		Penambahan	Pengurangan		
1	640.623.409.404,33	110.156.523.673,13	19.715.602.343,00	731.064.330.734,46	90.440.921.330,13

1. Peralatan dan Mesin:

(dalam Rupiah)

a. Mutasi Tambah

**110.156.523.673,13**

Belanja Modal Tahun 2023;

- Sekretariat DPRD	3.223.106.172,70
- Sekretariat Daerah	6.935.897.300,00
- Kecamatan Teweh Tengah	616.967.118,00
- Kecamatan Montallat	384.002.049,00
- Kecamatan Gunung Timang	167.937.000,00
- Kecamatan Lahei	364.394.700,00
- Kecamatan Teweh Timur	81.417.100,00
- Kecamatan Gunung Purei	708.309.000,00
- Kecamatan Teweh Baru	387.668.285,00
- Kecamatan Teweh Selatan	195.921.500,00
- Kecamatan Lahei Barat	79.400.000,00
- Dinas PUPR	14.610.899.938,00
- Dinas PRKPP	651.400.000,00
- Dinas Perhubungan	4.270.104.400,00
- Dinas Kesehatan	7.388.646.833,43
- Dinas Kesehatan (Dana Kapitasi)	253.368.833,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	4.022.479.000,00
- Rumah Sakit Umum Daerah (Dana BLUD)	4.257.506.009,00
- Dinas Daldukkbpp	611.213.000,00
- Dinas Pendidikan	2.398.707.690,00
- Dinas Pendidikan (Dana BOS)	1.093.183.500,00
- Dinas Sosial.Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.207.445.875,00
- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan UKM	143.640.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.151.476.000,00
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.395.236.000,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.067.852.000,00
- Dinas Pertanian	890.576.053,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	450.487.375,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	442.817.500,00
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.053.450.000,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.596.245.000,00
- Dinas PMPTSP	840.529.000,00
- Inspektorat	4.903.734.302,00
- Bappeda Litbang	2.550.265.950,00
- Dinas Lingkungan Hidup	6.958.660.330,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- Dinas Budparpora	740.980.700,00
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.004.119.358,00
- Satuan Polisi PP	1.577.330.189,00
- Badan Kepegawaian Pengembangan SDM	1.361.019.000,00
- DiskominfoSandi	6.643.705.252,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.273.447.838,00

Reklasifikasi:

- Kecamatan Teweh Tengah dari KIB-E	42.680.000,00
- Dinas Pendidikan dari KIB-C	436.132.450,00
- Dinas Pendidikan dari KIB-E	24.000.000,00
- Sekretariat Daerah dari KIB-E	52.080.000,00
- Dinas Budparpora dari KIB-C	74.484.500,00
- Kecamatan Lahei dari KIB-C	6.600.000,00
- Kecamatan Lahei dari KIB-E	3.500.000,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari KIB-E	23.600.000,00

Hibah:

- RSUD	1.410.426.510,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.000.000,00
- Dinas Perhubungan	1.337.009.610,00

Belanja Barang/Jasa:

- Dinas Pendidikan	115.859.600,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	392.532.853,00
- Dinas Pertanian	84.295.000,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.776.000,00

**b. Mutasi Kurang 19.715.602.343,00**

Reklasifikasi:

- Dinas Pendidikan – Barang Pakai Habis	45.710.000,00
- Kecamatan Teweh Tengah - Barang Pakai Habis	140.000.000,00
- Ruma Sakit Umum Daerah - Rusak Berat	12.736.839.510,00
- Dinas Kesehatan – Barang Pakai Habis	898.216.219,00
- Dinas Perhubungan – Pemeliharaan Jalan (Marka Jalan)	1.471.513.000,00
- Sekretariat DPRD - Rusak Berat	38.721.000,00
- Dinas Daldukkbpb – Barang Pakai Habis	349.260.000,00
- Dinas Penanggulangan Bencana Daerah - Rusak Berat	664.360.000,00
- Dinas Pertanian – Barang Pakai Habis	67.741.861,00
- Dinas Lingkungan Hidup – Barang Pakai Habis	1.550.000,00
- Dinas KominfoSandi – ATB	147.500.000,00
- Dinas KominfoSandi – Barang Pakai Habis	73.697.300,00
- Sekretariat Daerah	132.567.500,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset – Rusak Berat	172.676.266,00
- Dinas Pendidikan – KIB-D	5.435.000,00
- Dinas Budparpora – KIB-C	149.589.200,00

Ekstrakompatibel:

- Dinas Pendidikan	120.880.500,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	46.804.000,00
- Dinas Kesehatan	7.241.450,00







**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.886.000,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	223.170.000,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.103.526.000,00
- Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1.246.729.850,00
- Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa	48.693.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat KPP	268.800.000,00
- Kecamatan Lahei Barat	997.393.000,00
- Kecamatan Teweh Baru	33.960.000,00
- Kecamatan Montallat	1.010.877.210,00
- Kecamatan Teweh Tengah	50.000.000,00

Reklasifikasi;

- Dinas PUPR dari KDP	221.571.340.800,00
- Dinas PUPR dari KIB-D	206.200.000,00
- Rumah Sakit Umum Daerah dari KDP	1.961.741.300,00
- Dinas Pariwisata dari KIB-B	149.589.200,00
- Kecamatan Lahei dari KIB-D	16.590.000,00
- Sekretariat DPRD dari KDP	26.529.000,00
- Dinas Pertanian dari KIB-E	1.504.071.000,00

Belanja Barang/Jasa;

- Sekretariat Daerah	1.737.118.710,00
- Dinas Kesehatan	397.907.000,00
- Dinas Perhubungan	399.101.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat KPP	92.600.000,00
- Kecamatan Teweh Tengah	327.100.000,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	207.500.000,00
- Sekretariat DPRD	389.635.250,00
- Dinas Daldukkbpp	82.732.700,00
- Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa	460.156.100,00
- Dinas Pertanian	219.414.979,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.750.000,00
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	72.500.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup	156.895.000,00

Hibah;

- Satuan Polisi Pamong Praja	1.342.069.000,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	22.703.343.636,00
- Sekretariat Daerah	11.796.066.410,00

b. Mutasi Kurang

**54.603.391.243,00**

Reklasifikasi;

- Sekretariat DPRD ke KDP	190.430.250,00
- Dinas PUPR ke KDP	33.946.064.098,00
- Dinas PUPR ke KIB-D	67.306.900,00
- Dinas Perhubungan ke KDP	148.740.000,00
- Dinas Pendidikan ke KDP	12.146.658.225,00
- Dinas Kesehatan ke KDP	299.985.500,00
- Dinas Kesehatan ke KIB-D	12.763.815,00
- Dinas Pendidikan ke KIB-B	436.132.450,00
- Dinas Pendidikan ke KIB-D	84.805.000,00
- Dinas Penanggulangan Bencana Daerah ke KDP	29.526.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- Dinas Kominfosandi ke KDP	188.222.700,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke KIB-D	334.075.667,00
- Dinas Pariwisata ke KDP	109.745.850,00
- Dinas Pariwisata ke KIB-B	74.484.500,00
- Dinas Pariwisata ke KIB-D	3.435.000,00
- Dinas PRKPP ke KIB-A	909.668.000,00
Ekstra kompatabel;	
- Kecamatan Teweh Baru	10.800.000,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	12.500.000,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75.924.000,00
Penghapusan;	
- Dinas PUPR	245.369.030,00
- Dinas Perhubungan	1.242.982.500,00
- Dinas Kesehatan	723.409.766,00
- Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	402.490.000,00
- Dinas Pendidikan	1.696.451.667,00
- Dinas Pertanian	250.382.200,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.760.000,00
- Dinas Pariwisata	955.278.125,00

**5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp2.106.316.051.027,72**      **Rp1.909.838.267.835,79**

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.106.316.051.027,72 mengalami kenaikan sebesar Rp196.477.783.191,93 atau 10,29% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

**Tabel 5.63 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  
**31 Desember 2023**

No.	Saldo 01-01-2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo 31-12-2023	Naik/(Turun)
		Penambahan	Pengurangan		
1	1.909.838.267.835,79	362.043.329.900,93	165.565.546.709,00	2.106.316.051.027,72	196.477.783.191,93

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

a. Mutasi Tambah

(dalam Rupiah)

**362.043.329.900,93**

Belanja Modal Tahun 2023;

- Kecamatan Teweh Tengah	159.976.700,00
- Kecamatan Montallat	450.529.200,00
- Kecamatan Lahei	111.000.000,00
- Kecamatan Teweh Baru	118.875.749,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	351.860.723.029,29
- Dinas Perumahan Rakyat dan KPP	1.135.992.300,00
- Dinas Perhubungan	248.780.000,00
- Dinas Kesehatan	1.332.600.000,00
- Dinas Pendidikan	239.854.750,00
- Dinas Lingkungan Hidup	831.686.000,00
- Dinas Pariwisata	411.742.000,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	49.559.946,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89.397.000,00
Reklasifikasi;	
- Dinas Pekerjaan Umum dari KIB-C	67.306.900,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	334.075.667,00
- Dinas Kesehatan dari KIB-C	12.763.815,00
- Dinas Pendidikan dari KIB-C	84.805.000,00
- Dinas Pendidikan dari KIB-B	5.435.000,00
- Dinas Pariwisata	3.435.000,00
Belanja Barang/Jasa;	
- Satuan Polisi Pamong Praja	12.500.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup	206.016.000,00
- Dinas Kesehatan	158.165.900,00
Hibah;	
- Satuan Polisi Pamong Praja	4.107.100.000,00
- Koreksi	11.009.944,64
<b>b. Mutasi Kurang</b>	<b><u>165.565.546.709,00</u></b>
Reklasifikasi;	
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke KDP	164.628.261.594,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan KPP ke KDP	103.136.300,00
- Badan Pengelolaan Keuangan & Aset ke Rusak Berat	198.720.000,00
- Kecamatan Lahei ke KIB-C	16.590.000,00
- Kecamatan Lahei ke KIB-B	6.600.000,00
Ekstrakompatibel;	
- Kecamatan Montallat	50.000.000,00
- Kecamatan Teweh Baru	75.000.000,00
- Dinas Kesehatan	86.263.815,00
- Dinas Pendidikan	5.435.000,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	12.500.000,00
Barang yang diserahkan kemasyarakat/pihak ketiga;	
- Kecamatan Teweh Tengah	135.000.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	248.040.000,00

**5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp11.593.525.044,10 Rp11.300.422.364,10**

Saldo Aset Tetap Lainnya pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.593.525.044,10 mengalami kenaikan sebesar Rp293.102.680,00 atau 2,59% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

**Tabel 5.64 Aset Tetap Lainnya**  
**31 Desember 2023**

No	Saldo 01-01-2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo 31-12-2023	Naik/(Turun)
		Penambahan	Pengurangan		
1	11.300.422.364,10	2.616.121.879,00	2.323.019.199,00	11.593.525.044,10	293.102.680,00

Aset Tetap Lainnya:

a. Mutasi Tambah

Belanja Modal Tahun 2023;

(dalam Rupiah)

**2.616.121.879,00**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- Sekretariat Daerah	52.080.000,00
- Kecamatan Teweh Tengah	42.680.000,00
- Kecamatan Lahei	3.500.000,00
- Dinas Pendidikan	392.006.520,00
- Dinas Pertanian	1.504.071.000,00
- Dinas Pariwisata	91.250.000,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	150.000.000,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	122.856.200,00
Belanja Barang/Jasa;	
- Rumah Sakit Umum Daerah	31.605.500,00
- Dinas Pendidikan (BOS)	226.072.659,00
<b>b. Mutasi Kurang</b>	<b><u>2.323.019.199,00</u></b>
Reklasifikasi;	
- Sekretariat Daerah ke KIB-B	52.080.000,00
- Kecamatan Teweh Tengah ke KIB-B	42.680.000,00
- Kecamatan Lahei ke KIB-B	3.500.000,00
- Dinas Pendidikan ke KIB-C	24.000.000,00
- Dinas Pertanian ke KIB-C	1.504.071.000,00
- Badan Kepegawaian ke ATB	150.000.000,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23.600.000,00
Ekstrakompatibel;	
- Dinas Pendidikan (BOS)	464.172.109,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	58.821.090,00
Koreksi	95.000,00

**5.3.1.3.6. Konstruksi 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Dalam Pengerjaan Rp369.123.048.143,97 Rp380.791.286.616,97**

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp369.123.048.143,97 mengalami penurunan sebesar Rp11.668.238.473,00 atau 3,06% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

**Tabel 5.65 Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
**31 Desember 2023**

No	Saldo 01-01-2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo 31-12-2023	Naik/(Turun)
		Penambahan	Pengurangan		
1	380.791.286.616,97	211.891.372.627,00	223.559.611.100,00	369.123.048.143,97	(11.668.238.473,00)

**Konstruksi Dalam Pengerjaan**

*(dalam Rupiah)*

<b>a. Mutasi Tambah</b>	<b><u>211.891.372.627,00</u></b>
Reklasifikasi;	
- Dinas PUPR dari KIB-C	33.946.064.098,00
- Dinas PUPR dari KIB-D	164.180.531.204,00
- Dinas Pendidikan dari KIB-C	12.146.658.225,00
- Dinas Kominfo dari KIB-C	188.222.700,00
- BPBD dari KIB-C	29.526.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- Dinas Kesehatan dari KIB-C	299.985.500,00
- Dinas Perhubungan dari KIB-C	148.740.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan KPP dari KIB-A	263.375.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan KPP dari KIB-C	103.136.300,00
- Sekretariat DPRD dari KIB-C	190.430.250,00
- Dinas Pariwisata dari KIB-A	46.357.500,00
- Dinas Pariwisata dari KIB-C	109.745.850,00
- Dinas Lingkungan Hidup dari Barjas	238.600.000,00

b. Mutasi Kurang **223.559.611.100,00**

Reklasifikasi;

- Dinas PUPR ke KIB-C	221.571.340.800,00
- Rumah Sakit Umum Daerah ke KIB-C	1.961.741.300,00
- Sekretariat DPRD ke KIB-C	26.529.000,00

**5.3.1.3.7. Akumulasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Penyusutan (Rp1.855.288.283.180,54) (Rp1.680.055.766.418,54)**

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.855.288.283.180,54) mengalami kenaikan sebesar (Rp175.232.516.762,00) dibandingkan dengan saldo tahun 2022.

**Tabel 5.66 Akumulasi Penyusutan**  
**31 Desember 2023**

No.	Saldo 01-01-2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo 31-12-2023	Naik/(Turun)
		Penambahan	Pengurangan		
1	454.871.812.350,54	64.348.706.467,00	15.144.494.307,00	504.076.024.510,54	49.204.212.160,00
2	180.619.521.856,00	28.972.031.299,00	3.247.977.927,00	206.343.575.228,00	25.724.053.372,00
3	1.044.564.432.212,00	100.353.370.836,00	49.119.606,00	1.144.868.683.442,00	100.304.251.230,00
<b>JML</b>	<b>1.680.055.766.418,54</b>	<b>193.674.108.602,00</b>	<b>18.441.591.840,00</b>	<b>1.855.288.283.180,54</b>	<b>175.232.516.762,00</b>

**5.3.1.4. Aset Lainnya 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp1.250.562.731.601,00 Rp249.958.793.311,00**

Aset Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.250.562.731.601,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp249.958.793.311,00 yang disajikan sebagai berikut.

**5.3.1.4.1. Tagihan 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Jangka Panjang Rp147.729.531,00 Rp297.345.792,00**

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp147.729.531,00 mengalami penurunan sebesar Rp147.729.531,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp297.345.792,00.

**Tabel 5.67 Tagihan Jangka Panjang**  
**31 Desember 2023**

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	297.345.792,00	0,00	149.616.261,00	147.729.531,00
<b>Jumlah</b>	<b>297.345.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.616.261,00</b>	<b>147.729.531,00</b>









**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Adapun Saldo Kewajiban Jangka Pendek dapat dirinci sebagai berikut.

**5.3.2.1.1. Utang PFK**

Jumlah Utang PFK Dana BOS pada Sekolah Dasar TA 2023 sebesar Rp0,00 yang merupakan pelunasan hutang atas Saldo kas ditangan bendahara Dana BOS di Sekolah SD dan SMP sebesar Rp5.392.603,00 pada TA 2022, adapun pada TA 2023 hutang tersebut sudah dibayar lunas.

**5.3.2.1.2. Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.426.382.763,26 mengalami kenaikan sebesar Rp1.643.523.694,26 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp4.782.859.069,00. Adapun Rincian Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

1. DISKOMINFO

UTANG JASA LAYANAN TELKOM

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hutang Biaya Jasa Layanan Telkom Solution TA 2023 berdasarkan invoice Telkom Indonesia No. 4902249000072-202312	697.298.309,00
Jumlah (1)		<b>697.298.309,00</b>

2. BLUD RSUD MUARA TEWEH

A. UTANG BELANJA PEGAWAI

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hutang Belanja Pegawai TPP PPPK RSUD Muara Teweh TA 2023	81.833.400,00
Jumlah (A)		<b>81.833.400,00</b>

B. UTANG JASA PELAYANAN MEDIK KESEHATAN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan (September, Oktober, November dan Desember 2023)	3.576.420.320,00
2	Jasa Pelayanan Pasien Umum ( Oktober, November dan Desember 2023)	645.246.021,00
3	Jasa Pelayanan Pasien Covid ( Susulan pembayaran Tahun 2022, Januari, Februari, Maret, Mei dan Juni 2023)	532.311.480,00
4	Jasa Pelayanan Pasien SKTM (September, Oktober, November dan Desember 2023)	356.097.380,00
5	Biaya Jasa Medik Pasien Jasa Raharja	128.352.868,00
6	Biaya Jasa Pelayanan Pasien- BPJS Ketenagakerjaan	30.332.528,00
7	Jasa Pelayanan Pasien Obat kronis Tahun 2023)	13.081.257,00
Jumlah (B)		<b>5.281.841.854,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**C. UTANG JASA PIHAK KETIGA (BELANJA MAKAN MINUM PASIEN)**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hutang Pengadaan Bahan Makanan Pasien RSUD Muara Teweh Tanggal 21 s/d 31 Desember 2023	53.791.155,00
2	Hutang Pengisian Tabung Oxygen	63.125.000,00
	Jumlah (B)	<b>116.916.155,00</b>
	<b>TOTAL JUMLAH 2 = (A+B+C)</b>	<b>5.480.591.409,00</b>

**3. PPKD/BPKA**

**UTANG SALUR DBH-PRD**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hutang Salur DBH-PRD Sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023	248.492.345,26
	Jumlah (3)	<b>248.492.345,26</b>
	<b>TOTAL JUMLAH (1+2+3)</b>	<b>6.426.382.063,26</b>

**5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek lainnya yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp375.527.000,00 yang merupakan hutang pengadaan aset tetap yang melewati Tahun Anggaran 2023 pada Dinas PUPR yang mengalami kenaikan sebesar Rp97.416.967.697,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp3.062.298.550.00. Adapun Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Nama Kegiatan	Sisa Hutang
1	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lahei - Luwe (Muara Bakah Seberang)	188.696.500,00
2	Peningkatan Jl. Desa Muara Ini dari Simpang KM 20 Houling PT. Tamtama Perkasa Menuju Muara Inu (Owcess)	9.460.000,00
3	Rehabilitasi Jembatan Desa Liang Naga	9.945.000,00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Permata Angrek IV RT.18	6.800.000,00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Simpang Makam/ Gang DAM Wonorejo RT. 30 Kel. Melayu	9.070.000,00
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pasar Kompak Desa Butong Menuju Jalan Poros	9.075.000,00
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pelajar Desa Trahean	9.072.500,00
8	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pasipik RT.01 Desa Trinsing	9.075.000,00
9	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mawar RT.20 A Kel.Melayu	6.800.000,00
10	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mawar Gg Bintang RT.20 A Kel.Melayu	4.525.000,00
11	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Cempaka Putih Gg BARCELONA (Lanjutan)	9.080.000,00
12	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Permata Angrek Tembus Permata Biru	9.060.000,00
13	Peningkatan Jalan Desa Pasar Kompak Desa Butong	6.348.000,00
14	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Desa RT.5 Desa Buntok Baru Kec.Teweh Selatan	6.350.000,00



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

15	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tembus Jl. Nangka Menuju Komplek RSUD	6.800.000,00
16	Pekerjaan Rigit Jalan Kalimaya 1 dan 2 RT.31	9.050.000,00
17	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. masuk Desa Jamut	9.070.000,00
18	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Manggala	8.170.000,00
19	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Keluarga RT.30 Wonorejo (Lanjutan)	6.800.000,00
20	Pekerjaan Rigit Jalan Guen RT. 33b	9.070.000,00
21	Pekerjaan Pembuatan Jembatan Lingkungan Nongo RT. 12 Kel.Jingah ,	3.845.000,00
22	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Lintas Muara Teweh-Benangin Kel.Jambu	5.575.000,00
23	Pembuatan Parit dan Gorong-gorong di Pangku Raya	5.650.000,00
24	Pembuatan Parit Jl. Permata Putih,	9.070.000,00
25	Pembuatan Parit Jalan Berlian Kel. Lanjas	9.070.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>375.527.000,00</b>

**5.3.3. Ekuitas** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp5.753.434.518.631,50** **Rp3.782.265.309.822,51**

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.753.434.518.631,50 mengalami kenaikan dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.782.265.309.822,51.

### 5.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan–LO.beban.dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan – LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut. Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan – LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi. efektivitas. dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila *deficit operasional*) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

dipertanggungjawabkan.

**5.4.1. Pendapatan-LO**

**Rp2.347.402.453.761,96**

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan Pendapatan – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.347.402.453.761,96 yang mengalami kenaikan sebesar Rp826.043.385.547,55 atau sebesar 54,30% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp1.521.359.068.214,41.

Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor 15 tentang Pendapatan–LO dan Pendapatan–LRA. Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali dan dalam pengakuannya Pendapatan– LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pada saat pendapatan dapat direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Rincian Pendapatan - LO Kabupaten Barito Utara dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 5.73 Pendapatan-LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	98.696.314.491,90	96.256.265.495,69	2.440.048.996,21
Pendapatan Transfer	2.063.132.106.932,89	1.395.923.481.881,72	667.208.625.051,17
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	185.574.032.337,17	29.179.320.837,00	156.394.711.500,17
<b>Jumlah</b>	<b>2.347.402.453.761,96</b>	<b>1.521.359.068.214,41</b>	<b>826.043.385.547,55</b>

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

**5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO**

**Rp98.696.314.491,90**

Pendapatan Asli Daerah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp98.696.314.491,90 yang mengalami kenaikan sebesar Rp2.440.048.996,21 atau sebesar 2,53% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp96.256.265.495,69.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Barito Utara yang tersaji dalam Laporan Operasional adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.74 Pendapatan Asli Daerah-LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pajak Daerah - LO	25.603.469.634,70	21.260.116.445,20	4.343.353.189,50
Retribusi - LO	9.193.491.528,00	10.206.124.316,00	(1.012.632.788,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	543.291.681,96	10.093.389.005,00	(9.550.097.323,04)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	63.356.061.647,24	54.696.635.729,49	8.659.425.917,75
<b>Jumlah</b>	<b>98.696.314.491,90</b>	<b>96.256.265.495,69</b>	<b>2.440.048.998,21</b>

**5.4.1.1.1. Pajak Daerah-LO**

**Rp25.603.469.634,70**

Pendapatan Pajak Daerah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp25.603.469.634,70 yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.343.353.189,50 atau sebesar 20,43% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp21.260.116.445.20.

Pendapatan Pajak Daerah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari pajak daerah dalam periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.75 Pajak Daerah –LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Pajak Hotel – LO	592.067.498,00	589.789.130,00	2.278.368,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	11.559.497.593,70	8.316.220.747,20	3.243.276.846,50
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	0,00
Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	330.872.800,00	290.597.002,00	40.275.798,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron -LO	298.400.000,00	308.858.050,00	(10.458.050,00)
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	8.215.185.350,00	7.333.968.804,00	881.216.546,00
Pajak Parkir - LO	84.357.400,00	67.422.300,00	16.935.100,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.127.693.848,00	626.815.460,00	500.878.388,00
Pajak Sarang Burung Walet	41.720.100,00	38.171.500,00	3.548.600,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	2.366.178.385,00	2.515.472.140,00	(149.293.755,00)
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	0,00	0,00	0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	987.496.660,00	1.172.801.312,00	4.528.657.841,50
<b>Jumlah</b>	<b>25.603.469.634,70</b>	<b>21.260.116.445,20</b>	<b>4.343.353.189,50</b>

**5.4.1.1.2. Retribusi Daerah-LO**

**Rp9.193.491.528,00**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp9.193.491.528,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp-1.012.632.788,00 atau sebesar 9,92% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp10.206.124.316.00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Pendapatan Retribusi Daerah – LO merupakan pengakuan pendapatan dari pajak retribusi dalam periode Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.76 Retribusi Daerah –LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	419.118.250,00	210.374.950,00	208.743.300,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	339.300.000,00	346.727.154,00	(7.427.154,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	124.622.508,00	137.822.508,00	(13.200.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	256.152.000,00	122.770.508,00	133.381.492,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang– LO	192.370.000,00	151.959.000,00	40.411.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	82.640.000,00	124.160.000,00	(41.520.000,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	112.764.600,00	116.429.930,00	(3.665.330,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.050.670.770,00	914.415.220,00	136.255.550,00
Retribusi Terminal – LO	0,00	180.000,00	(180.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	6.127.613.000,00	7.450.965.000,00	(1.323.352.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	288.590.400,00	326.077.000,00	(37.486.600,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	105.150.000,00	162.770.000,00	(57.620.000,00)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	13.973.046,00	(13.973.046,00)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	94.500.000,00	127.500.000,00	(33.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>9.193.491.528,00</b>	<b>10.206.124.316,00</b>	<b>(1.012.632.788,00)</b>

**5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LO Rp543.291.681,96**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp543.291.681,96 yang mengalami penurunan sebesar Rp9.550.097.323,04 atau sebesar 94,62% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp10.093.389.005,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO merupakan pengakuan pendapatan dari bagi hasil deviden penyertaan modal/investasi daerah dalam periode Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.77 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	462.144.253,00	10.058.366.983,00	-9.596.222.730,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta - LO	81.147.428,96	35.022.022,00	46.125.406,96
<b>Jumlah</b>	<b>543.291.681,96</b>	<b>10.093.389.005,00</b>	<b>-9.550.097.323,04</b>

**5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Rp63.356.061.647,24**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp63.356.061.647,24 yang mengalami kenaikan sebesar Rp8.659.425.917,75 atau sebesar 15,83% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp54.696.635.729,49.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO merupakan pengakuan pendapatan dalam periode Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.78 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO  
Tahun 2022 dan 2023**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	194.302.421,00	960.000,00	193.342.421,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang	0,00	267.700.000,00	(267.700.000,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	285.702.016,00	201.255.600,00	84.446.416,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	268.087,00	(268.087,00)
Penerimaan Jasa Giro - LO	9.538.101.697,00	5.647.050.216,00	3.891.051.481,00
Pendapatan Bunga - LO	0,00	88.029.566,60	(88.029.566,60)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0,00	10.988.611,00	(10.988.611,00)
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain-LO	0,00	110.443.711,00	(110.443.711,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	769.769.334,51	1.027.498.135,89	(527.728.801,38)
Pendapatan Denda Pajak - LO	189.212.959,00	2.756.215.988,00	(2.567.003.029,00)
Pendapatan Denda Retribusi - LO	16.881.900,00	25.622.300,00	(8.740.400,00)
Pendapatan dari Pengembalian	2.931.815.273,33	837.820.843,00	2.093.994.430,33
Pendapatan BLUD - LO	43.289.139.524,00	46.126.274.216,00	(2.837.134.692,00)
Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan – LO	0,00	790.400,00	(790.400,00)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0,00	(2.603.626.395,00)	2.603.626.395,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	160.401.804,00	192.594.450,00	(32.192.646,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	0,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)
Remunerasi-LO	5.980.734.718,40	0,00	5.980.734.718,40



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Jumlah	63.356.061.647,24	54.696.635.729,49	8.659.425.917,75

**5.4.1.2. Pendapatan Transfer–LO**

**Rp2.063.132.106.932,89**

Pendapatan Transfer–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp2.063.132.106.932,89 yang mengalami kenaikan sebesar Rp667.208.625.051,17 atau sebesar 47,80% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp1.395.923.481.881,72.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara nomor 47 Tahun 2015 tentang Transfer pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan realisasi pendapatan transfer pada Tahun 2022 dalam laporan operasional terdiri atas.

**Tabel 5.79 Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.931.065.018.818,00	1.326.732.870.954,93	604.332.147.863,07
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	132.067.088.114,89	69.190.610.926,79	62.876.477.188,10
<b>Jumlah</b>	<b>2.063.132.106.932,89</b>	<b>1.395.923.481.881,72</b>	<b>667.208.625.051,17</b>

**5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat–LO**

**Rp1.931.065.018.818,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.931.065.018.818,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp604.332.147.863,07 atau sebesar 45,55% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp1.326.732.870.954,93.

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah terdiri atas Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dan Dana Insentif Daerah dimana pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.80 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Perimbangan-LO	1.925.270.787.818,00	1.326.732.870.954,93	598.537.916.863,07
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.794.231.000,00	0,00	5.794.231.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.931.065.018.818,00</b>	<b>1.326.732.870.954,93</b>	<b>604.332.147.863,07</b>

**Tabel 5.81 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dan 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	1.242.016.532.930,00	609.066.818.641,00	632.949.714.289,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	519.179.304.326,00	525.047.890.423,93	(5.868.586.097,93)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	84.255.485.379,00	113.091.807.470,00	(28.836.322.091,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	79.819.465.183,00	77.064.489.420,00	2.754.975.763,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.794.231.000,00	2.461.865.000,00	3.332.366.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.931.065.018.818,00</b>	<b>1.326.732.870.954,93</b>	<b>604.332.147.863,07</b>

**5.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Provinsi-LO**

**Rp132.067.088.114,89**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp132.067.088.114,89 yang mengalami kenaikan sebesar Rp62.876.477.188,10 atau sebesar 90,87% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp69.190.610.926,79.

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi untuk Tahun 2021 dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.82 Transfer Pemerintah Provinsi-LO  
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	131.917.088.114,89	69.190.610.926,79	62.726.477.188,10
Bantuan Keuangan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>132.067.088.114,89</b>	<b>69.190.610.926,79</b>	<b>62.876.477.188,10</b>

**5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO**

**Rp185.574.032.337,17**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp185.574.032.337,17 yang mengalami kenaikan sebesar Rp156.394.711.500,17 atau sebesar 535,98% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp29.179.320.837,00.

Penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO untuk Tahun 2022 dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.83 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah—LO  
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Hibah - LO	164.735.959.337,17	9.056.842.000,00	155.679.117.337,17
Lain-Lain pendapatan - LO	20.838.073.000,00	20.122.478.837,00	715.594.163,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Jumlah	185.574.032.337,17	29.179.320.837,00	156.394.711.500,17
--------	--------------------	-------------------	--------------------

**5.4.2. Beban-LO**

**Rp1.395.401.402.048,25**

Beban – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.395.401.402.048,25 yang mengalami kenaikan sebesar Rp351.724.564.108,49 atau sebesar 33,70% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp1.043.676.837.939,76.

Menurut Kebijakan Akuntansi Kabupaten Barito Utara Nomor 47 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban dan merupakan komponen yang digunakan untuk menyusun Laporan Operasional.

Beban- LO terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.84 Beban – LO Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai - LO	480.094.108.930,00	432.848.183.912,00	47.245.925.018,00
Beban Persediaan	171.976.912.004,97	113.387.667.023,17	58.589.244.981,80
Beban Jasa	166.168.171.906,00	133.732.199.004,00	32.435.972.902,00
Beban Pemeliharaan	19.037.860.071,00	10.099.846.207,00	8.938.013.864,00
Beban Perjalanan Dinas	102.492.122.558,00	67.149.643.345,00	35.342.479.213,00
Beban Subsidi	23.500.000,00	19.708.000,00	3.792.000,00
Beban Hibah	102.335.824.376,00	25.758.852.846,00	76.576.971.530,00
Beban Bantuan Sosial	2.554.815.594,00	2.409.332.875,00	145.482.719,00
Beban Penyisihan Piutang	1.659.196.065,78	414.597.906,00	1.244.598.159,78
Beban Penyusutan dan Amortisasi	193.885.751.452,00	175.620.504.970,36	18.265.246.481,64
Beban Transfer	153.973.079.257,50	81.270.696.561,23	72.702.382.696,27
Beban Lain-lain	1.200.059.833,00	965.605.290,00	234.454.543,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.395.401.402.048,25</b>	<b>1.043.676.837.939,76</b>	<b>351.724.564.108,49</b>

Adapun penjelasan Tabel 5.84 atas Beban Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

**5.4.2.1. Beban Pegawai-LO**

**Rp480.094.108.930,00**

Beban Pegawai–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp480.094.108.930,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp47.245.925.018,00 atau sebesar 10,92% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp432.848.183.912,00.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara .pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai -LO dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 5.85 Beban Pegawai-LO**

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun
1	Gaji Dan Tunjangan	269.046.843.183,00	256.944.608.360,00	12.102.234.823,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	125.110.318.215,00	88.106.850.600,00	37.003.467.615,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.729.735.650,00	74.429.777.467,00	(1.700.041.817,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.068.053.474,00	11.962.719.723,00	105.333.751,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	141.953.408,00	181.274.484,00	(39.321.076)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	561.600.000,00	783.823.278,00	(222.223.278,00)
7	Beban Pegawai BLUD	435.605.000,00	439.130.000,00	(3.525.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>480.094.108.930,00</b>	<b>432.848.183.912,00</b>	<b>47.245.925.018,00</b>

**5.4.2.2. Beban Persediaan-LO**

**Rp171.976.912.004,97**

Beban Persediaan – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp171.976.912.004,97 yang mengalami kenaikan sebesar Rp58.589.244.981,80 atau sebesar 51,67% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp113.387.667.023,17. Rincian Beban Persediaan –LO dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 5.86 Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	117.003.229.365,79
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	160.515.927,18
3	Beban Barang dan Jasa BOS	19.000.806.467,00
4	Beban Barang dan Jasa BLUD	35.812.360.245,00
	<b>Jumlah</b>	<b>171.976.912.004,97</b>

Rincian Beban Persediaan per SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.87 Realisasi Beban Persediaan Berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2023**

NO	SKPD	PERSEDIAAN
1	DINAS PENDIDIKAN	21.674.297.866,00
2	DINAS KESEHATAN	25.235.392.216,72
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD	36.589.805.624,07
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.091.182.773,18
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.018.468.992,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.585.195.375,00
7	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	999.797.834,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	523.367.227,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.272.763.161,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	SKPD	PERSEDIAAN
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.138.962.425,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	2.217.244.027,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	4.205.709.330,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.475.824.558,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	608.626.240,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB DAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	1.749.080.143,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.108.275.544,00
17	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN	841.075.613,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	438.355.082,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN	526.327.709,00
20	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.417.628.541,00
21	DINAS PERTANIAN	27.387.049.823,00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.261.573.655,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	10.471.211.463,00
24	SEKRETARIAT DPR	3.722.568.740,00
25	KEC TEWEH TENGAH	1.518.473.798,00
26	KEC TEWEH TIMUR	169.460.750,00
27	KEC LAHEI	350.921.875,00
28	KEC GUNUNG TIMANG	406.834.000,00
29	KEC MONTALAT	588.678.863,00
30	KEC GUNUNG PUREI	261.122.650,00
31	KEC TEWEH BARU	646.384.850,00
32	KEC TEWEH SELATAN	342.997.050,00
33	KEC LAHEI BARAT	637.919.250,00
34	INSPEKTORAT	1.274.587.669,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	845.669.650,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	784.299.605,00
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	998.345.119,00
38	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	1.591.432.914,00
<b>Jumlah</b>		<b>171.976.912.004,97</b>

**5.4.2.3. Beban Jasa-LO**

**Rp166.168.171.906,00**

Beban Jasa – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

disajikan sebesar Rp166.168.171.906,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp32.435.972.902,00 atau sebesar 24,25% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp133.732.199.004,00. Rincian Beban Jasa – LO dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.88 Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	132.365.899.893,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.656.882.149,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	889.175.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	537.043.410,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	13.500.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.641.957.831,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.171.619.000,00
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	9.058.081,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	40.000.000,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.932.298.286,00
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	136.359.613,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	651.353.765,00
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.123.024.878,00
<b>Jumlah</b>		<b>166.168.171.906,00</b>

Rincian Beban Jasa–LO berdasarkan SKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.89 Realisasi Beban Jasa Berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2023**

NO	SKPD	JASA
1	DINAS PENDIDIKAN	23.246.369.826,00
2	DINAS KESEHATAN	27.432.675.197,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD	16.175.168.546,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.647.615.589,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	667.167.933,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.829.768.885,00
7	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.024.819.299,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.706.945.170,00
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	481.202.272,00
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.271.535.215,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	2.438.867.533,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.225.233.890,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.371.587.770,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	777.091.999,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB DAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	3.393.002.014,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.774.991.187,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	SKPD	JASA
17	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN	8.774.644.377,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.312.195.184,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN	939.026.481,00
20	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	3.530.605.744,00
21	DINAS PERTANIAN	4.780.998.692,00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.342.580.045,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	6.906.675.994,00
24	SEKRETARIAT DPR	7.281.454.013,00
25	KEC TEWEH TENGAH	746.168.201,00
26	KEC TEWEH TIMUR	86.901.500,00
27	KEC LAHEI	611.948.752,00
28	KEC GUNUNG TIMANG	285.889.000,00
29	KEC MONTALAT	550.829.104,00
30	KEC GUNUNG PUREI	166.609.050,00
31	KEC TEWEH BARU	634.187.993,00
32	KEC TEWEH SELATAN	254.437.150,00
33	KEC LAHEI BARAT	221.046.072,00
34	INSPEKTORAT	1.432.502.872,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.314.613.031,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1.268.770.257,00
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	4.892.949.927,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3.369.096.142,00
<b>JUMLAH</b>		<b>166.168.171.906,00</b>

**5.4.2.4. Beban Pemeliharaan-LO**

**Rp19.037.860.071,00**

Beban Pemeliharaan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp19.037.860.071,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp8.938.013.864,00 atau sebesar 88,50 % dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp10.099.846.207,00. Rincian Beban Pemeliharaan – LO dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.90 Realisasi Beban Pemeliharaan  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.678.785.429,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.775.413.684,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.574.060.958,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	9.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.037.860.071,00</b>

Rincian Beban Pemeliharaan – LO berdasarkan SKPD dapat dijelaskan pada tabel



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

sebagai berikut.

**Tabel 5.91 Realisasi Beban Pemeliharaan Berdasarkan SKPD  
Tahun Anggaran 2023**

NO	SKPD	PEMELIHARAAN
1	DINAS PENDIDIKAN	396.008.073,00
2	DINAS KESEHATAN	244.310.881,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.336.162.747,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	37.962.196,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	132.933.500,00
7	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	68.222.300,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	455.088.000,00
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	27.432.400,00
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	312.626.167,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	58.740.120,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	234.543.400,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	610.255.000,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	394.250.575,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB DAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	178.594.610,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.640.455.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN	163.145.708,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8.030.000,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN	21.383.000,00
20	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	309.957.138,00
21	DINAS PERTANIAN	177.282.217,00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	135.278.368,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	2.093.121.624,00
24	SEKRETARIAT DPR	206.604.500,00
25	KEC TEWEH TENGAH	90.975.000,00
26	KEC TEWEH TIMUR	
27	KEC LAHEI	90.643.750,00
28	KEC GUNUNG TIMANG	134.610.000,00
29	KEC MONTALAT	91.433.750,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	SKPD	PEMELIHARAAN
30	KEC GUNUNG PUREI	39.427.500,00
31	KEC TEWEH BARU	188.145.000,00
32	KEC TEWEH SELATAN	55.312.000,00
33	KEC LAHEI BARAT	22.000.000,00
34	INSPEKTORAT	556.678.610,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	286.566.750,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	93.682.000,00
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	63.069.578,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	82.928.609,00
<b>JUMLAH</b>		<b>19.037.860.071,00</b>

**5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas-LO**

**Rp102.492.122.558,00**

Beban Perjalanan Dinas – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp102.492.122.558,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp35.342.479.213,00 atau sebesar 52,63% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp67.149.643.345,00.

Rincian Beban Pemeliharaan – LO berdasarkan SKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.92 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan SKPD  
Tahun Anggaran 2023**

NO	SKPD	PERJALANAN DINAS (RP)
1	DINAS PENDIDIKAN	6.407.950.380,17
2	DINAS KESEHATAN	16.407.107.507,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD	43.277.656,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.093.325.960,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.379.651.476,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.828.040.634,00
7	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.435.128.488,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.618.491.488,00
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.400.407.699,00
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.999.190.762,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOPERASI DAN UKM	1.078.769.684,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.140.468.280,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.418.458.236,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	720.979.950,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB DAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	1.796.161.350,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.111.956.138,00
17	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN	1.491.467.981,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	945.862.143,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN	1.018.148.149,00
20	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN &	1.688.203.419,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	SKPD	PERJALANAN DINAS (RP)
	OLAHRAGA	
21	DINAS PERTANIAN	3.462.758.166,00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.059.655.427,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	8.052.167.406,00
24	SEKRETARIAT DPRD	19.657.069.023,00
25	KEC TEWEH TENGAH	796.393.947,83
26	KEC TEWEH TIMUR	208.105.000,00
27	KEC LAHEI	320.298.608,00
28	KEC GUNUNG TIMANG	409.765.000,00
29	KEC MONTALAT	323.507.407,00
30	KEC GUNUNG PUREI	294.939.000,00
31	KEC TEWEH BARU	333.534.408,00
32	KEC TEWEH SELATAN	221.338.987,00
33	KEC LAHEI BARAT	297.763.610,00
34	INSPEKTORAT	4.795.444.236,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.886.811.024,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1.030.686.696,00
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.273.955.521,00
38	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.864.881.711,00
<b>Jumlah</b>		<b>102.492.122.558,00</b>

**5.4.2.6. Beban Bunga-LO**

**Rp0,00**

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda adapun realisasi beban bunga pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp0,00

**5.4.2.7. Beban Subsidi-LO**

**Rp23.500.000,00**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat disajikan sebesar Rp23.500.000,00 dan Penyajian Tahun 2022 sebesar Rp19.708.000.00 adapun rincian Beban Subsidi-LO adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.93 Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta  
Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban SubsidiKepada Badan Usaha Milik Swasta	23.500.000,00	19.708.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>19.708.000,00</b>

**5.4.2.8. Beban Hibah-LO**

**Rp102.335.824.376,00**

Beban Hibah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp102.335.824.376,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp76.576.971.530,00 atau sebesar 297,28% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp25.758.852.846,00.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat adapun rincian beban hibah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dapat tergambar sebagai berikut.

**Tabel 5.94 Beban Hibah Tahun 2023**

URAIAN	Tahun2023	Tahun 2022
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	180.000.000.00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	149.087.500,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan lembaga yang bersifat Nirlaba sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	91.402.457.194,00	22.225.243.500.00
Beban Hibah uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.070.000.000,00	3.947.399.639.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.830.000.000,00	(5.453.019.975,00)
Beban Hibah Uang Dana Bos yang diterima oleh Satdikdas Negeri	3.965.275.000,00	3.933.212.500.00
Beban Hibah Uang Dana Bos yang diterima oleh Satdidas Swasta	427.800.000,00	434.812.500.00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	491.204.682,00	491.204.682.00
<b>Jumlah</b>	<b>102.335.824.376,00</b>	<b>25.758.852.846,00</b>

**5.4.2.9. Beban Bantuan Sosial -LO**

**Rp2.554.815.594,00**

Beban Bantuan Sosial – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp2.554.815.594,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp145.482.719,00 atau sebesar 6,04% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp2.409.332.875.00. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun rincian Beban Bantuan Sosial sebagai berikut.

**Tabel 5.95 Beban Bantuan Sosial**  
**Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	90.990.994,00	1.261.430.000.00
Beban Bantuan Sosial Uang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.256.024.600,00	240.102.875.00
Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.207.800.000,00	907.800.000.00
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.554.815.594,00</b>	<b>2.409.332.875.00</b>

**5.4.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

**Rp193.885.751.452,00**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu dengan kata lain beban penyusutan dan amortisasi merupakan beban untuk mencatat lokasi sistematika atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Sedangkan amortisasi digunakan untuk mencatat lokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Untuk penyusutan aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara nomor 41 tentang aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut.

**Tabel 5.96 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.348.657.557,00	61.803.668.329,36	2.544.989.227,64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.972.080.209,00	18.927.640.304,00	10.044.439.905,00
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	100.353.370.836,00	94.722.868.137,00	5.630.502.699,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	211.642.850,00	166.328.200,00	45.314.650,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>193.885.751.452,00</b>	<b>175.620.504.970,36</b>	<b>18.265.246.481,64</b>

**5.4.2.11. Beban Penyisihan Piutang Rp1.659.196.065,78**

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain, adapun beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp1.659.196.065,78. Adapun Rincian Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut.

**Tabel 5.97 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	1.659.196.065,78	414.597.906,00	1.244.598.159,78
<b>Jumlah</b>	<b>1.659.196.065,78</b>	<b>414.597.906,00</b>	<b>1.244.598.159,78</b>

**5.4.2.12. Beban Transfer Rp153.973.079.257,50**

Beban Transfer-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp153.973.079.257,50 yang mengalami kenaikan sebesar Rp72.702.382.696,27 atau 89,46% dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp81.270.696.561.23.

Beban transfer tahun 2023 terdiri atas Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dan Beban



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah. Adapun Rincian Beban Transfer sebagai Berikut.

**Tabel 5.98 Beban Transfer**  
**Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.105.703.092,63	1.592.745.954,31	512.957.138,32
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	931.523.564,87	848.821.006,92	82.702.557,95
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	490.000.000,00	485.000.000,00	5.000.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	150.445.852.600,00	78.344.129.600,00	72.101.723.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>153.973.079.257,50</b>	<b>81.270.696.561,23</b>	<b>72.702.382.696,27</b>

**5.4.2.13. Beban Lain-lain** **Rp1.200.059.833,00**

Beban Lain-lain-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.200.059.833,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp234.454.543,00 atau 24,28 dari penyajian Tahun 2022 sebesar Rp965.605.290,00.

**5.4.3. Surplus/Defisit Dari Operasi-LO** **Rp952.001.051.713,71**

Selisih lebih /kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Dari perhitungan pendapatan dan beban operasional diperoleh surplus perhitungan Tahun 2023 sebesar Rp Adapun Rincian Surplus/Defisit dari Operasi-LO sebagai berikut.

**Tabel 5.99 Surplus/Defisit Dari Operasi-LO**  
**Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Surplus / Defisit dari Operasi	952.001.051.713,71	477.682.230.274,65	474.318.821.439,06

**5.4.4. Pos Luar Biasa** **Rp0,00**

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos Luar Biasa yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 merupakan beban dari penggunaan dana tak terduga dan pembayaran dana tak terduga.

**Tabel 5.100 Pos Luar Biasa**  
**Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

<b>Jumlah Surplus/Defisit Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**5.4.5. Surplus/Defisit - LO** **Rp947.562.836.262,71**

Surplus/Defisit –LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus /Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan – LO dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.101 Surplus/Defisit  
Tahun 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>
Surplus/Defisit Operasi	952.001.051.713,71	477.682.230.274,65	474.318.821.439,06
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(4.438,215.451,00)	(5.028.186.643,00)	589.971.192,00
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
<b>Surplus Defisit - LO</b>	<b>947.562.836.262,71</b>	<b>472.654.043.631,65</b>	<b>472.908.792.631,06</b>

**5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan financial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/ atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah. Dimana sampai dengan akhir Tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Barito Utara TA 2023 dan TA 2022 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.102 Arus Kas Tahun 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	976.310.757.687,80	376.829.387.430,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Anggaran	(612.282.188.891,42)	(293.383.355.839,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(27.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	0,00	(176.153.770,64)
<b>Jumlah</b>	<b>337.028.568.796,38</b>	<b>80.269.877.820,82</b>

**5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** **Rp337.028.568.796,36**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp337.028.568.796,38 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp80.269.877.820,82 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan sebagai berikut.

**5.5.1.1. Arus Kas Masuk** **Rp2.260.438.721.167,04**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar Rp2.260.438.721.167,04 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barito Utara tahun 2022. Sedangkan tahun 2022 sebesar Rp1.352.277.797.898,69. Arus kas Masuk dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.103 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**  
**Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022(Rp)
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	24.903.662.174,70	20.200.409.777,20
Pendapatan Retribusi Daerah	9.026.715.028,00	10.131.945.418,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	477.599.093,96	10.058.366.983,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	60.284.818.429,21	68.005.783.596,89
Dana Bagi Hasil Pajak	108.304.329.918,00	118.522.148.806,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	1.133.712.203.012,00	245.755.459.705,00
Dana Alokasi Umum	519.179.304.326,00	500.634.214.445,00
Dana Alokasi Khusus	164.074.950.562,00	190.156.296.890,00
Dana Penyesuaian	5.794.231.000,00	2.461.865.000,00
Dana Desa	76.583.107.000,00	77.474.633.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	137.107.844.000,00	88.604.195.440,60
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	1.883.623,17	20.113.731.837,00
Pendapatan Lainnya	20.838.073.000,00	8.747.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>2.260.438.721.167,04</b>	<b>1.352.277.797.898,69</b>

**5.5.1.2. Arus Kas Keluar** **Rp1.284.127.963.479,24**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp 1.284.127.963.479,24 terdiri dari Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran ditambah Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 diperoleh dari selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar. Arus kas Keluar dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 5.104 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**  
**Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Pegawai	480.012.275.530,00	433.763.233.912,00
Belanja Barang	468.893.854.067,00	347.403.933.299,00
Belanja Hibah	102.335.824.376,00	33.106.872.821,00
Belanja Bantuan Sosial	2.554.815.594,00	2.409.332.875,00
Belanja Subsidi	23.500.000,00	19.708.000,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.857.210.747,37	1.592.745.954,31
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	931.523.564,87	848.821.006,92
Transfer Bagi Hasil Bantuan Keuangan ke Pemda lain	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kabupaten/Provinsi	227.518.959.600,00	156.303.762.600,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>1.284.127.963.479,24</b>	<b>975.448.410.468,23</b>

**5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan Rp612.282.188.891,42**

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp612.282.188.891,42 Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

**5.5.2.1. Arus Kas Masuk Rp0,00**

Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp960.000,00 atas hasil penulana aset gedung dan bangunan.

**5.5.2.2. Arus Kas Keluar Rp612.282.188.891,42**

Arus Kas Keluar Investasi/Non Keuangan tahun 2023 sebesar Rp612.282.188.891,42 terdiri dari Belanja Modal dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Arus Kas Keluar Investasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.105 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan**  
**Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Tanah	1.933.195.040,00	380.061.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin	105.955.547.150,13	66.476.780.468,00
Belanja Bangunan dan Gedung	143.947.870.107,00	113.547.863.236,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	357.040.716.674,29	112.512.217.795,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.358.443.720,00	466.432.620,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Perolehan Aset Lainnya	1.046.416.200,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>612.282.188.891,42</b>	<b>293.383.355.839,00</b>

**5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp27.000.000.000,00**

Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.000.000.000,00 Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 berupa pencairan Sisa Dana Cadangan ke Rekening Kas Daerah.

**5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp0,00**

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp176.153.770,64. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp0,00 selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar. Koreksi SILPA Tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan kas di bendahara pengeluaran TA 2023 pada Dinas Pendidikan pada tahun 2022.

**5.5.4.1. Arus Kas Masuk Rp119.804.754.398,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran pada TA 2023 sebesar Rp119.804.754.398,00 adalah Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

**Tabel 5.106 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022**

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	119.804.754.398,00	73.335.675.753,97
Saldo Sisa UP TA 2023	0,00	0,00
Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>119.804.754.398,00</b>	<b>73.335.675.753,97</b>

**5.5.4.2. Arus Kas Keluar Rp119.804.754.398,00**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran pada TA 2023 sebesar Rp119.804.754.398,00 adalah Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

**Tabel 5.107 Arus Kas Keluar Aktivitas Transioritas/Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022**

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>		



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.804.754.398,00	73.335.675.753,97
Saldo Sisa UP TA 2023	0,00	0,00
Koreksi SiLPA	0,00	176.153.770,64
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>119.804.754.398,00</b>	<b>73.511.829.524,61</b>

**5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas Rp337.028.568.796,38**

Dari perhitungan arus kas masuk dan keluar semua aktivitas diketahui terjadi surplus kas sebesar Rp337.028.568.796,38

**5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD Rp802.301.696.933,23**

Saldo Awal kas di BUD sebesar Rp802.301.696.933,23 terdiri dari.

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	337.028.568.796,38	80.269.877.820,82
Saldo Awal Kas di BUD	465.273.128.136,85	385.003.250.316,03
Koreksi Penambahan/Pengurangan Saldo Kas	0,00	0,00
Koreksi Reklasifikasi Saldo	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD	802.301.696.933,23	465.273.128.136,85

**5.5.7. Saldo Akhir Kas Rp 802.301.696.933,23**

Saldo Akhir Kas sebesar Rp802.301.696.933,00 terdiri atas:

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	337.028.568.796,38	80.269.877.820,82
Saldo Awal Kas di BUD	465.273.128.136,85	385.003.250.316,03
Koreksi Penambahan/Pengurangan Saldo Awal Kas	0,00	0,00
Koreksi Reklasifikasi Saldo Kas	0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>		
- Saldo Akhir Kas di Kasda	753.744.508.570,23	418.558.385.141,85
- Saldo Akhir Kas di BLUD	40.384.874.666,00	40.692.400.011,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	2.848.360.983,00	6.014.206.535,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Bos	10.307.254,00	5.555.603,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	15.288.400,00	0,00
Kas Lainnya	5.298.357.060,00	7.973.449,00
<b>Utang PFK Ppn (BOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.603,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>802.301.696.933,00</b>	<b>465.273.128.136,85</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

**5.6. Laporan Perubahan Ekuitas Neraca**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

**5.6.1. Ekuitas Awal**

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.782.265.309.822,51 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2022.

**5.6.2. Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)**

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp947.562.836.262,71.

**5.6.2.1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

**5.6.2.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00

**5.6.2.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00**

Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp0,00 karena tidak ada dilakukan revaluasi atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

**5.6.2.4. Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp1.023.606.372.546,28

Ekuitas akhir senilai Rp5.753.434.518.631,50



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

### BAB VI

#### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 184 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangandan Laporan Arus Kas.

LaporanRealisasiAPBDPemerintahKabupatenBaritoUtarahun2021disajikandengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.Namun demikian penyesuaian yang diperlukan atas pos-pos dalam laporan keuangan yang meliputi LRA. LO.LPE. Laporan Perubahan SAL, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas telah dilakukan dalam rangka penyajiannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Barito Utara. Beberapa informasi berkenaan dengan Pemerintah Kabupaten BaritoUtara:

#### **Domisili Entitas**

Pemerintah Kabupaten Barito Utara beralamat Jl. Jend. A. Yani No. 76. Telepon (0519) 21120-245565.Faksimil (0519) 22432 Muara Teweh-73811. Website: [www.baritoutarakab.go.id](http://www.baritoutarakab.go.id) Email: [setda@baritoutarakab.go.id](mailto:setda@baritoutarakab.go.id).

#### **Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya**

Tugas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara adalah menyusun program kegiatan sesuai renstra dan renja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (JM) Kabupaten Barito Utara serta visi dan misi Bupati Barito Utara untuk peningkatan pembangunan di segala bidang.

#### **Ketentuan Perundang-Undangan Sebagai Landasan Operasional**

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BaritoUtara.
2. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten BaritoUtara.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017;
4. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran2019;
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2019
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.





# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

### **Bupati. Wakil Bupati. Sekretaris Daerah dan Bendahara Umum Daerah**

Bupati	: H. Nadalsyah
Wakil Bupati	: Sugianto Panala Putra.S.H.
Sekretaris Daerah	: Drs. Muhlis
Bendahara Umum	: Drs. Jufriansyah.M.A.P.

### **Visi dan Misi Bupati Barito Utara**

#### **Visi :**

Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera.

#### **Misi :**

Memfokuskan Pada Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Serta Mengembangkan BUMD yang Berbasis Keunggulan Lokal. Mendorong Laju Investasi. Pembangunan Infrastruktur yang Memadai serta Pembangunan Memperhatikan Keserasian Ruang:

Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Perijinan dan Penyiapan Lapangan Kerja dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan;

Mengembangkan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pertambangan. Kehutanan. Perkebunan dan Pertanian). Serta Potensi Lainnya ke Arah Yang Lebih Baik Secara Terintegrasi dan Lestari. Demi Kepentingan Kemakmuran Rakyat Sesuai Skala Prioritas.

Berbasis Ilmu Pengetahuan Sesuai Tuntutan Kebutuhan Lokal dan Nasional;

Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Menempatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Tepat pada Tempat yang Benar;

Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Budaya Kearifan Lokal. Toleransi Kultural. Kerukunan Antar Umat Beragama, Suku, Ras, maupun Golongan.

### **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Jumlah dan Jenis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas serta 9 Kantor Kecamatan.

### **Lembaga Vertikal**

Disamping berbagai perangkat daerah diatas maka dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang tidak ditangani oleh Pemda Kabupaten Barito Utara seperti di bidang penegakan hukum, keamanan, ketertiban, pengadilan, perbankan/moneter, agama dan lain-lain terdapat instansi vertikal yang menangani hal tersebut yaitu:

1. Kepolisian Resort Barito Utara
2. Pengadilan Negeri MuaraTeweh



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

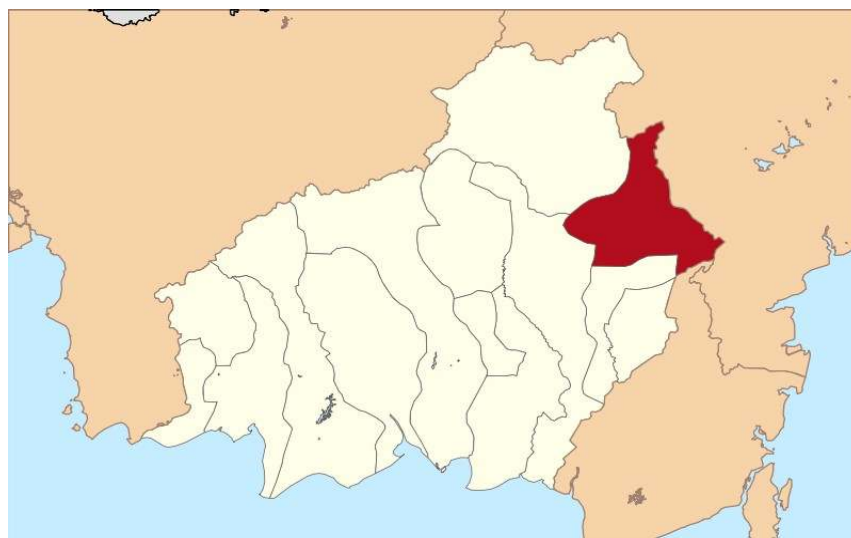
3. Kodim 1013 MuaraTeweh
4. KPPN
5. Kejaksaan Negeri MuaraTeweh
6. Pengadilan Agama MuaraTeweh
7. Badan PusatStatistik
8. Kantor Kementrian Agama Kab. BaritoUtara
9. Badan Pertanahan NasionalKab. Barito Utara
- 10.Kantor Pelayanan Pajak Pratama MuaraTeweh
- 11.Sekretariat KPU Kab. BaritoUtara
- 12.BPJS Kesehatan MuaraTeweh

**Lembaga Keuangan dan Perbankan**

Delapan unit Lembaga Keuangan dan Perbankan di Kab. Barito Utara

1. Bank Syariahmandiri
2. Bank Mega
3. Bank Nasional Indonesia 1946 MuaraTeweh
4. Bank Danamon Cabang MuaraTeweh
5. Bank Pembangunan Kalteng Cabang MuaraTeweh
6. Bank Rakyat Indonesia Cabang MuaraTeweh
7. Bank Mandiri Cabang MuaraTeweh
8. BankSyariah

**Profil Kabupaten Barito Utara**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

Semboyan	: Iya Mulik Benkang Turan(Pantang Menyerah Sebelum Berhasil)
Petalokasi	: Koordinat: 114° 27' 00" – 115° 49' 00" Bujur Timur dan 0° 58' 30" Lintang Utara – 1° 26' 00" Lintang Selatan
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Ibu kota	: MuaraTeweh
Bupati	: Pj. Muhlis
DAU	: 475.180.280.000
Luas	: 8.300km <sup>2</sup>
TotalPopulasi	: 123.781 jiwa (2012)
Kepadatan	: 14.91 jiwa/km <sup>2</sup>
Kode area telepon	: 0519
Kecamatan	: 9 (sembilan)
Website	: <a href="http://www.baritoutarakab.go.id/">http://www.baritoutarakab.go.id/</a>

Berikut ini adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Kabupaten Barito Utara sejak tahun 1951:

1. George Obos (1951-1954)
2. Barnstein Baboe (1954-1956)
3. M. Saleh (1956)
4. Sepener Botor (1956-1957)
5. M. Dirham (1958-1959)
6. Samsi Silam (1959-1966)
7. H. Abdul Moehir (1966-1969)
8. Yetro Sinseng (1969-1977)
9. Drs. E. Hosang (1977-1988)
10. Drs. H.A. Dj. Nihin (1988-1998)
11. Ir. H. Badaruddin (1998-2003)
12. Ir. H. Achmad Yuliansyah. M.M. (2003-2008. 2008-2013)
13. H. Nadalsyah (2013-2019)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama periode pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas.

Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK SKPD. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; memberi kesempatan kepada pegawai yang berkompeten untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah mengembangkan infrastruktur baik hardware maupun software yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional sehingga diharapkan akan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat dipertahankan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berusaha melakukan perbaikan baik penatausahaan pengelolaan keuangan maupun sistem pengendalian intern. Harapannya dengan Rencana Aksi dan dukungan seluruh aparatur pemerintahan dapat mempunyai komitmen bersama untuk mendukung dipertahankannya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

Muara Teweh, 31 Desember 2023

**Pj. BUPATI BARITO UTARA**



**Drs. MUHLIS**